

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG (PUPR) KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI
GENANGAN DAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

VIVI FITRI

NPM : 147110381

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Vivi Fitri
NPM : 147110381
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komferehensif.

Pekanbaru, 10 Januari 2019

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr.H.A.Tarmizi Yussa, MA

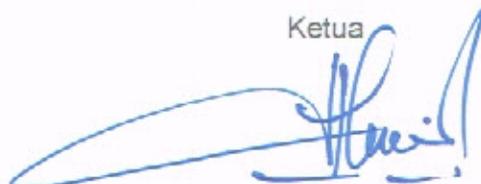


Drs.Syapril Abdullah,M.Si

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua



Hendry Andry, S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Vivi Fitri
NPM : 147110381
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai).

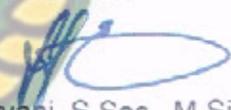
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 10 Januari 2019

Sekretaris,

Ketua

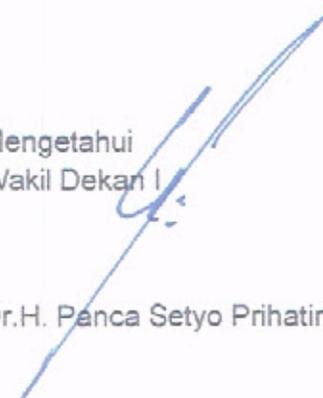
Drs. Zulkifli, M.Si.


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.
Anggota


Drs. Syapril Abdullah, M. Si.
Anggota


Arief Rifai H, S. Sos, M. Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *92* /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 06 Februari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 07 Februari 2019 jam 09.00 - 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

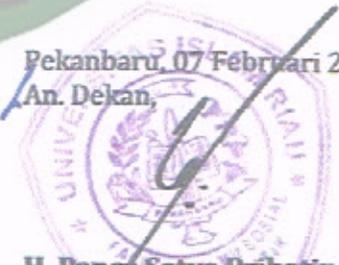
Nama : Vivi Fitri
NPM : 147110381
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Genanngan dan Banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai).”

Nilai Ujian : Angka : "B. 65" ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Zulkifli, M.Si.	Ketua	1.
2.	Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA.	Anggota	3. X
4.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si.	Anggota	4.
5.	Arief Rifai Harahap, S.Sos., M.Si.	Anggota	5.
6.	Eko Handrian, S.Sos., MAP	Notulen	6.

Pekanbaru, 07 Februari 2019

An. Dekan,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.

Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vivi Fitri
NPM : 147110381
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Januari 2019

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua



Drs. Zulkifli, M.Si.



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,



Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.

Program Studi
Ilmu Administrasi Publik

Ketua



Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 92/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Vivi Fitri**
N P M : 147110381
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan Dan Banjir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai).

1. Drs. Zulkifli, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Lilis Suryani, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Ariel Rifai Harahap, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Eko Handrian, S.Sos., M.AP	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Februari 2019
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk penguji-----

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor:913/UIR-Fs/Kpts/2017 Tentang :
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Ibtidai Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- Menetapkan : 1. **MEMUTUSKAN**
Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:
- I Nama : Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA
NIP/NPK : 891202153
Pangkat/Jabatan : III/e-Lektor
Kedudukan : Pembimbing I
- II Nama : Des. Syapril Abdullah, M.Si
NIP/NPK : 910802185
Pangkat/Jabatan : III/e - Lektor
Kedudukan : Pembimbing II
- Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:
- Nama : Vivi Fitri
NPM : 147110381
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi / Administrasi Publik.
Judul Skripsi : Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru.
2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.
- Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 November 2017
An. Dekan

H. Panca Setvo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

- Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi Adm. Publik
 3. Yth. Ka. Labor Adm. Publik
 4. Arsip --SK Pembimbing.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Teip. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117. PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 603/DPMTSP/NON IZIN-RISET/15747
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1703/E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 31 Oktober 2018, dengan ini membuat rekomendasi kepada:

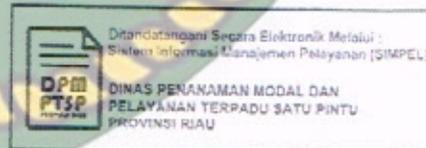
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : WVI FITRI |
| 2. NIM / KTP | : 147110381 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI PUBLIK |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EVALUASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI GENANGAN DAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DIKECAMATAN MARPOYAN DAMAI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PEKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 November 2018



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2018/3682

232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/15196 tanggal 31 Oktober 2018, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : VIVI FITRI
2. NIM : 147110381
3. Fakultas : FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
5. Jenjang : S1
6. Judul Penelitian : EVALUASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI GENANGAN DAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI)
7. Lokasi Penelitian : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

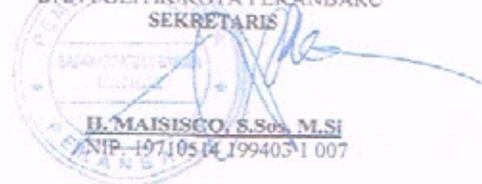
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 November 2018

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
 SEKRETARIS



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Dt. Setiamaharaja No. 2 Kec. Bukit Raya - Pekanbaru Telp. (0761) 571524, 571530

Pekanbaru, 29 November 2018

Nomor : 552/DPU-PR/SEKRE/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : Telah Melaksanakan izin Riset

Kepada Yth:
Fakultas Fisipol
Universitas Islam Riau
Di -

Pekanbaru
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sehubungan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-REKOM/2018/3682 Tanggal 21 November 2018 perihal Rekomendasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkenan hal diatas, kami beritahukan :

Nama : VIVI FITRI
NIM : 147110381
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah melaksanakan Riset dengan Judul ("EVALUASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI GENANGAN DAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAIIN)

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

Sekretaris


A.SAATI, ST, MT

Pembina Tk.I

NIP. 19611203 198503 1 009

EVALUASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI GENANGAN DAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh

VIVI FITRI

Genangan dan banjir merupakan permasalahan yang cukup serius baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Penelitian ini melihat dan mengukur sejauh mana hasil dari program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif tipe survey dengan menggunakan analisis kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Kepala Dinas, Kabid perencanaan, Pengawasan, Kasi Perencanaan Teknis dan Kasi Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan dan masyarakat pengguna program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir. Jumlah populasi dalam penelitian ini untuk aparat pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebanyak 4 orang dan masyarakat sebanyak 30 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik sensus dan teknik accidental sampling. Pengumpulan data dari responden dilakukan melalui wawancara dan menyebar kusioner serta observasi lapangan agar mengetahui hasil dari program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan empat indikator untuk mengukur keberhasilan program ini, empat indikator tersebut adalah : Pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong, program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pelaksanaan normalisasi saluran drainase, dan rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase. Setelah penelitian dianalisa dianalisa penelitian kuantitatif pelaksanaan penelitian yang dilakukan, maka hasil dari program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi dan genangan di Kota Pekanbaru “cukup terlaksana”, hal ini sesuai dengan jawaban dan pernyataan yang diberikan oleh responden.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Permasalahan Banjir

**EVALUASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI GENANGAN DAN BANJIR DI
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh

VIVI FITRI

Inundation and flooding is a serious problem both in terms of social, economic and cultural. The research looked at and measure the extent to which the results of the program Pekanbaru City Publik Works and Spatial Planning department to overcome inundation and flooding in the city of Pekanbaru. This research is a field of research with survey-type descriptive study using quantitative analysis. Population of this research is the department of Publik Works and Spatial Planning which consists of the head of department, head of palnning, monitoring, kasi kasi technical, planning and evaluation, monitoring, and reporting and the user community program Pekanbaru city department of Publik Works and Spatial Planning of 4 people and society as many as 30 people. Sampling technique using cencus technique and accidental sampling technique. The collection of data from respondents was conducted through interviews and disseminate questionnaire and field observations in order to find out the results of the program Pekanbaru city Publik Works and Spatial Planning department in addressing inundation and flooding in the city of Pekanbaru. In conducting this study, reseachers used four indicators to measure the success of this program four indicators are : Program construction of drainage and culverts, rehabilitation or maintenance of the rivel cahnel normalization, the implementation of the normalization of drainage channels, and the rehabilitation or maintenance of drainage cahnnels. Based on the implementation og the reseach conducted, the results of the program Pekanbaru City Publik Works and Spatial Planning department in addressing the inundation and flooding in the city of Pekanbaru fairly implemented, it is in accordance with the answers and statements given by the respondent.

Key workds : Evaluation, program, flooding problems

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhamma SAW, dengan ucapan “Allahummah Sholli’alaa Muhamad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”.

Adapun judul dari Skripsi ini yaitu “ **Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai)** ”. Skripsi ini penulis tulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun teoritisnya. Dengan demikian penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar Skripsi ini lebih mendekati kesempurnaan. Penulis sangat berharap agar Skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang memfasilitasi serta banyak memberikan saran arahan sehingga memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan proposal ini.
4. Ibu Nurmasari, S. Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku Pembimbing 1 yang telah banyak menyediakan waktu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Drs. Syafril Abdullah, M. Si selaku pembimbing 2 yang telah banyak menyediakan waktu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat, arahan dan bimbingan kepada penulis

dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
9. Ibu Kepala Tata Usaha beserta stafnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan terutama bantuan administratif kepada penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik.
10. Bapak A. Saat, ST.MT selaku Keapal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Bapak, Bapak Rudy Wahyudi, ST selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan SDA, Bapak Herdolatif, SE, MT selaku Kepala bidang SDA, Bapak Bakri, ST selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi SDA yang telah memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta memberikan data yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terkhususnya dan teristimewa penulis persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua tercinta yakni Zamhir dan Enfitriani yang selaku memberikan dukungan penulis baik dari segi moril, materil maupun doa-doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada abang, kakak dan adik penulis yakni Benny Asrul, Siska Fitri, Fadly Jalil serta seluruh keluarga besar Kota Lubuk Sikaping (SUMBAR) yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan mendoakan kelancaran studi hingga proposal ini terselesaikan.

13. Teman-teman seperjuangan di kelas C Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yaitu Eka Dila Putri, Novieltha Dwi Anggi, Awetri Zulfa Nadia S.AP, Parulian Rotua, Vivi Pratiwi, Irfan Fernando, Siti Aisyah S.AP, dan yang lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu.

14. Dan teman-teman sesama pembimbing yang sama-sama berjuang dari awal sampai sekarang yaitu Siti Supiana S.AP, Fenti Rawaty S.AP, Sarmijan, Rodiyah, dan yang lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama. Amin Yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 10 Januari 2019

Penulis

Ttd

Vivi Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRAC.....	xviii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	16
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik.....	17
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik.....	18
4. Konsep Manajemen Strategis.....	20
5. Konsep Visi dan Misi.....	21
6. Konsep Akuntabilitas Publik.....	23
7. Konsep Kebijakan.....	23
8. Konsep Pembangunan (Development) Perkotaan.....	24
9. Konsep Perencanaan Pembangunan.....	25
10. Konsep Pelaksanaan.....	26
11. Konsep Evaluasi.....	27
12. Konsep Evaluasi Program.....	28
B. Kerangka Fikir.....	34
C. Hipotesis.....	35
D. Konsep Operasional.....	35
E. Operasional Variabel.....	39
F. Teknik Pengukuran.....	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47

C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Teknik Penarikan Sampel.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	53

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas.....	54
1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	54
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	56
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	58
B. Struktur Keorganisasian Dinas PUPR Kota Pekanbaru.....	61
C. TUPOKSI Organisasi dinas PUPR Kota Pekanbaru.....	63
D. Permasalahan Genangan dan Banjir Di Kota Pekanbaru....	71

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	74
B. Tanggapan Responden.....	80
C. Hasil Rekapitulasi dan Tanggapan Responden.....	98

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	105
--------------------------------	------------

LAMPIRAN.....	108
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir tahun 2016-2018.....	7
1.2 Data Tata Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir Tahun 2016-2018.....	9
1.3 Infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan Dan banjir di Kota Pekanbaru.....	10
1.4 Data RKT dan RKA Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir Di Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	11
II.1 Operasional Variabel penelitian rencana umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru.....	39
III.1 Populasi dan Sampel penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.....	49
III.2 Jadwal Waktu dan Kegiatan penelitian perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru.....	53
IV.1 Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.....	57
IV.2 Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.....	58
IV.3 Daftar Nama 12 Kecamatan Beserta Kelurahan Di Kota Pekanbaru 2016-2018.....	59
V.1 Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin....	75
V.2 Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Usia.....	76
V.3 Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	76
V.4 Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Pekerjaan khusus untuk masyarakat.....	77
V.5 Data Lokasi banjir yang menjadi objek penelitian.....	78
V.6 Data Jumlah Pembuatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong- Gorong Di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2018.....	79
V.7 Data Waktu Pelaksanaan Normalisasi sungai di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2018.....	79
V.8 Data Waktu Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase dan Jumlah Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2018.....	80
V.9 Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pembuatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong.....	82
V.10 Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai.....	86
V.11 Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai.....	90

V.12	Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Rehabilitasi atau Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase.....	94
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden dalam Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan Dan Banjir di Kota Pekanbaru.....	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru.....	53
II.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Dinas PUPR Kota Pekanbaru.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Photo Dokumentasi.....	108
2. Kusioner Penelitian Masyarakat Pengguna Program.....	121
3. Daftar Wawancara Kepala Bidang SDA Dinas PUPR	129
4. Rekap Telly Masyarakat Pengguna Program	130
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau.....	132
6. Surat Keterangan Riset Dari DPMPTSP Kota Pekanbaru.....	133
7. Surat Keterangan Riset Dari KESBANG Kota Pekanbaru.....	134
8. Surat Keterangan Selesai Riset Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa *latin* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut *amministrasjon*, sedangkan di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut *administration*. Pengertian tersebut kemudian berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

Ilmu administrasi pada dasarnya membicarakan fenomena kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kita pahami bahwa banyak hal yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin didapat atau diperoleh tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau menggapai cita-cita misalnya, tentu individu memerlukan bantuan dan kerjasama dengan pihak lain.

Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada buruknya administrasi. Tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan bahkan kelangsungan hidup peradapan itu sendiri akan sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Selain administrasi, organisasi merupakan unsur utama bagi-bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya berbagai aktifitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada zaman modern ini, keberadaan organisasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama secara efisien ditengah situasi yang semakin kompleks. Keberadaan organisasi memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan yang sulit dicapai oleh individu secara perorangan menjadi lebih mudah karena adanya kerjasama antar individu yang memungkinkan terjadinya sinergi antar potensi individual yang dapat mencapai tujuan individu maupun tujuan organisasi itu sendiri. (*Brantas, 2009*).

Setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat profit, seperti perusahaan maupun organisasi yang bersifat non-profit, seperti organisasi massa, yayasan, instansi pemerintahan, dan lain-lainnya tentu menginginkan adanya pertumbuhan dan keberlanjutan dalam setiap aktifitasnya. Seperti halnya administrasi, organisasi juga merupakan salah satu fenomena sosial masyarakat modern. Melalui organisasi, orang dapat memenuhi dan mencapai berbagai kebutuhan dan tujuannya. Oleh karena itu, akan dijumpai beragam prinsip yang mereka pegang dalam memanfaatkan organisasi sebagai alternative alat untuk mencapai tujuan.

Peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam pembangunan perkotaan, secara sosiologi pemerintah akan lebih meningkatkan pembangunan karena kondisi masyarakat yang kompleks dan teliti. Maka administrasi pemerintah mesti memiliki daya tanggap yang tinggi agar cepat menyikapi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini yang utama terjadi dalam pembangunan yang nyata tanjible atau perlu disikapi segera. Tujuannya adalah agar kepercayaan publik semakin baik kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Karena persoalan-persoalan sehari-hari yang mereka rasakan di respon dan di selenggarakan dengan cepat oleh pemerintah. Hal ini menayakan karakteristik pemerintah yang amanah dan bertanggung jawab. Begitu juga halnya dalam mengadminstrasikan Kota, pemerintah mesti memiliki sikap sebagai pelayan yang responsif dan bertanggung jawab.

Undang-undang No 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa kota merupakan tempat bagi banyak orang untuk melakukan banyak aktivitas, maka untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan penduduknya harus ada sanitasi yang memadai misalnya drainase. Dengan adanya drainase tersebut genangan air hujan dapat disalurkan sehingga banjir dapat dihindari dan tidak akan menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada masyarakat serta aktivitas masyarakat tidak akan terganggu.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang memiliki aspek penting dan vital untuk mempercepat suatu proses pembangunan nasional. Infrastruktur adalah sarana yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, sosial

budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antara daerah dan daerah lain. Pembangunan Infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan hak pada rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota terbesar di Propinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan Kota Pekanbaru segera akan menjadi salah satu kota yang cukup strategis dari sudut pandang ekonomi sehingga aktivitas pergerakan pola aliran barang dan jasa baik dari dalam kota atau luar kota semakin meningkat.

Kota Pekanbaru terdapat 12 Kecamatan yaitu Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, dan Tenayan Raya. Disini saya akan menjelaskan salah satu dari kecamatan ini yaitu Kecamatan Marpoyan Damai karena focus saya ada di Kecamatan ini. Marpoyan Damai adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 29,74 km². Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 116.536 jiwa dengan kepadatan 3919 jiwa/km². Kecamatan ini memiliki kode wilayah 14.71.09 dan Kecamatan ini memiliki 5 kelurahan yaitu Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Timur, Tangkerang Barat, Tangkerang Tengan, Wonorejo.

Pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru ini belum diimbangi oleh pembangunan fasilitas pendukung yang memadai, dalam penyediaan jaringan drainase. Saat terjadinya musim hujan limpahan air hujan dari kawasan pemukiman dan badan jalan tidak dapat dialirkan dengan lancar, sehingga genangan air setiap tahunnya tinggi dan lama-kelamaan genangan air hujan semakin bertambah. Penyebab lain adalah pemukiman penduduk yang sembrautan tanpa di tata dengan baik, disertai dengan buruknya kebijakan dari masyarakat yang banyak membuang sampah ke parit-parit atau selokan air. Tidak tertatanya drainase dengan baik, sebagai salah satu penyebab utama banjir di Kota Pekanbaru. Padahal Kota Pekanbaru semestinya tidak perlu menjalankan hal demikian, karena di pinggiran kota ini di aliri oleh sungai yang besar dan dalam yaitu sungai siak.

Permasalahan banjir atau genangan dikota Pekanbaru sampai saat ini merupakan masalah yang cukup serius karena ada akan mempengaruhi kehidupan kota baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Kota Pekanbaru sampai saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama di setiap musim hujan maka diperlukan penataan drainase yang lebih baik lagi sehingga bisa mencegah terjadinya banjir.

Sehubungan dengan kedudukan kota Pekanbaru dengan fungsi sebagai pusat pemerintah, pusat perdagangan, serta pusat pelayanan jasa baik skala local maupun regional, maka perkembangan kota Pekanbaru segera akan menjadi salah satu kota yang cukup strategis dari sudut pandang ekonomi sehingga aktifitas pergerakan pola aliran barang jasa baik dari dalam kota sampai luar kota volumenya semakin meningkat. Dengan demikian maka kota

Pekanbaru secara langsung berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah sekitarnya.

Dari segi ekonomi dapat dikatakan bahwa meningkatnya pembangunan, sarana dan prasarana ekonomi, pemukiman/perumahan serta fasilitas pelayanan pendukungnya sangat menguntungkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan maupun daerah sekitarnya. Namun di sisi lain perkembangan Kota Pekanbaru pada masa akan datang apabila tidak terarah dan terkendali sesuai perencanaan tata kota yang baik dapat menimbulkan persoalan serius diperkotaan antara lain masalah kemacetan lalu lintas, masalah lingkungan kumuh dan masalah banjir dilingkungan pemukiman penduduk maupun ruas jalan perkotaan.

Permasalahan banjir atau genangan air di kota Pekanbaru sampai saat ini merupakan masalah yang cukup serius karena akan mempengaruhi kehidupan kota baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Kota Pekanbaru sampai saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan waktu lama di setiap musim hujan.

Penanganan banjir di Kota Pekanbaru menjadi tanggung jawab pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu "Terwujudnya pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat dan nyaman serta prasarana jalan dan prasarana pengairan yang handal" Sedangkan misinya yaitu :

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir.
- b. Meningkatkan fungsi jaringan dalam kota.

- c. Mewujudkan sarana dan prasarana pemukiman.
- d. Membantu pembangunan gedung-gedung perumahan dan utilitas pemerintah kota lainnya.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan mitra kerja lingkup pekerjaan umum.
(Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (PUPR) 2016, 2017 dan 2018).

Adapun program kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam penanganan genangan dan banjir di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong.
2. Program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai.
3. Pelaksanaan normalisasi saluran drainase.
4. Rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase.
(Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (PUPR) 2016, 2017 dan 2018).

Penanganan banjir di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang sumberdaya air dan sumur resapan terdapat dalam pasal 15 sebagai berikut :

1. Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan pemukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun.
2. Bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegahan banjir dari dinas teknis yang menangani pengembangan sumber air.
3. Rekomendasi pencegahan banjir atau peir banjir seperti tersebut pada ayat (2) diatas diutamakan bagi pemohon yang akan membangun pada lahan dengan luas diatas 5.000 (lima ribu) meter persegi atau berdasarkan pertimbangan/ketentuan lainnya dari dinas/instansi yang terkait.
4. Setelah proses pembangunan selesai dikerjakan, diperlukan pemeriksaan atau pengecekan apakah rekomendasi pencegahan banjir/genangan seperti tersebut pada ayat (3) telah dilaksanakan seperti apa yang telah ditetapkan.

5. Pelaksanaan pengecekan/pemeriksaan seperti tersebut pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi pemberi izin bangunan.
(*Walikota Pekanbaru*).

Banjir di Kota Pekanbaru salah satunya juga di sebabkan oleh tersumbatnya saluran drainase oleh sampah-sampah. Dimana peneliti banyak menemukan masyarakat yang secara sengaja membuang sampah ke saluran drainase. Dalam hal ini peneliti juga menanyakan mengapa mereka membuang sampah ke saluran drainase karena sudah menjadi kebiasaan mereka dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan membersihkan sampah yang menyumbat pada saluran drainase. Salah satu gambar terjadinya banjir dan genangan di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

Telah terjadi banjir di sepanjang jalan Kaharuddin Nasution yang mengakibatkan terganggunya perjalanan bagi pengguna jalan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini pada tanggal 22 Maret 2018 Di Jalan Kaharuddin Nasution di Depan Simpang Kartama, ini adalah kondisi banjir yang di dokumentasikan pada gambar I.1 :

Gambar I.1 :



Tata rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di kota Pekanbaru realisasi tahun yaitu:

1. Pembangunan waduk kompleks perkantoran pemko Pekanbaru tenayan raya (on proses).
2. Pembangunan kolam retensi di Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya, Payung Sekaki (masih dalam tahap perencanaan).
3. Pembangunan sumur resapan di setiap kantor kecamatan sekota Pekanbaru.

(Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru).

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Pekanbaru yakni :

1. Pasang naik Sungai Siak.
2. Kebiasaan Masyarakat yang membuang sampah ke dalam parit / sungai.
3. Berkurangnya daerah resapan akibat meningkatnya pertumbuhan pemukiman penduduk.
4. Perilaku pengembangan ruko yang menutup parit / drainase.
5. Pembangunan drainase belum terintegrasi secara menyeluruh.

(Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru).

Dalam penelitian ini evaluasi adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indicator evaluasi dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan public. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Jadi dalam hal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru harus mengevaluasi program-program yang

telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah genangan dan banjir di kota Pekanbaru, apakah genangan air Kota Pekanbaru sudah menjadi program yang turut menjadi perhatian penting PEMKO Pekanbaru karena hal ini sangat menyusahkan masyarakat.

Adapun data yang diperoleh dari tata rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Banjir tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah:

1. Program pembangunan turab/talud/bronjong.
2. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya.
 - a. Kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai (alat berat).
 - b. Kegiatan rehabilitas / pemeliharaan normalisasi saluran sungai (tenaga manusia/manual).

Wilayah-wilayah yang menjadi perhatian khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir Karena sering terjadinya banjir yaitu Kecamatan Rumbai Peisir, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tampan, Kecamatan Sail dan Kecamatan Lima Puluh. Terutama dalam wilayah yang menjadi objek (locus) adalah Kecamatan Marpoyan Damai.

Dalam mewujudkan pembangunan yang baik menurut Nanga (1991) pembangunan daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif (*dalam Munir 2004;156*).

Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Pembangunan Turap / leoning sekota Pekanbaru.
2. Waduk Cipta Karya.

Adapun data tentang RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas PUPR Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir Di Kota Pekanbaru berikut analisisnya :

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memberikan perhatian dalam hal penanggulangan banjir di antaranya yaitu :

- a. Sudah menyiapkan program normalisasi saluran sungai khususnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan, sekaligus menyiapkan anggaran sebesar Rp 2.497.240.700,00 yang terlampir di hal. 109.
- b. Sudah menyiapkan program pemeliharaan sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru khususnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan, sekaligus menyiapkan anggaran sebesar Rp 5.294.806.822,00 yang terlampir di hal. 111.
- c. Sudah menyiapkan pembuatan leoning sepanjang 900 meter khususnya program pembangunan turap / talud / bronjong, sekaligus menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.997.202.700,00 yang terlampir di hal. 114.

Berdasarkan hasil observasi penulis di ketahui bahwa dalam Evaluasi Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai) terdapat beberapa fenomena. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari pengamatan yang ditemui peneliti yaitu :

1. Kurangnya pemeliharaan drainase yang ada oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru maupun rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kondisi drainase

lingkungannya. Contohnya seperti yang ada di sepanjang jalan di kecamatan marpoyan damai dimana banyaknya saluran drainase yang tersumbat oleh sampah maupun tanah. Dalam hal ini dinas PUPR Kota Pekanbaru kurang tanggap dalam mengatasinya.

2. Perkembangan Kota Pekanbaru yang mulai pesat, menyebabkan perubahan fungsi tata guna lahan dari daerah yang tak terbangun (lahan kosong) menjadi daerah terbangun (seperti bangunan gedung, perumahan, jalan dan fasilitas fisik lainnya), sehingga daerah resapan air permukaan dan daerah tampungan air sementara semakin berkurang. Sehingga apabila hujan turun maka air tidak lagi meresap ke tanah melainkan akan mengalir ke badan-badan jalan dan menyebabkan banjir dijalanan.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan tidak diimbangi dengan pembangunan saluran pembuangan (drainase) yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan. Contohnya disepanjang jalan Kaharudin Nasution seharusnya saluran drainase diperbesar karena dengan kondisi saluran drainase yang sekarang kecil tidak mampu lagi menampung debit air yang besar ketika hujan turun lebat dan hal ini mengakibatkan air hujan melimpah kejalan sehingga menyebabkan banjir.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dan fakta-fakta yang ditemukan peneliti dilapangan, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh yang akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul “**Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)**”

Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan Dan Banjir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai)”.

B. Rumusan Masalah

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesejangan antara harapan dan kenyataan

Selain kondisi fisik factor pendukung sangat berperan dalam perkembangan Kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah penduduk kota pekanbaru secara langsung akan berpengaruh pada bertambahnya penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan penduduk di perkotaan. Kenaikan kebutuhan kegiatan kota tersebut akan selalu berpacu dengan kebutuhan penyediaan fasilitas perkotaan, sehingga pembangunan fasilitas perumahan, perdagangan, fasilitas umum lainnya serta pembangunan sarana dan prasarana jalan berlangsung dengan pesatnya. Namun pesatnya pembangunan tersebut belum diimbangi oleh pembangunan fasilitas pendukung yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase. Limpahan air hujan dari kawasan pemukiman dan badan jalan tidak dapat dialirkan dengan lancar, sehingga genangan air setiap tahunnya tinggi dan lama genangan air hujan semakin bertambah.

Penanggulangan banjir perlu direncanakan dan dilaksanakan secara terancang dan sistematis. Tujuannya agar suatu kawasan tidak lagi mengalami banjir serta dampak yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini akan dilakukan penilaian terhadap kemungkinan penetapan keputusan tentang penanggulangan banjir pada objek penelitian.

Evaluasi program bertujuan untuk menilai situasi objek sebelum dan sesudah program dilaksanakan apakah menjadi lebih baik atau tetap seperti biasa atau semakin memperburuk keadaan.

Oleh karena itulah dari beberapa gejala permasalahan yang dikemukakan diatas maka perumusan masalah dari peneliti ini yaitu “ **Bagaimana Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan Dan Banjir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai) ?**”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menggambarkan dan menilai program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait bidang ilmu administrasi public khususnya tentang Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai).
- b. Bagi akademik, yaitu sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan teori dan konsep terutama terkait pengembangan ilmu administrasi public di fakultas ilmu sosial dan politik universitas islam riau.

- c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama pada masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak pada permasalahan.

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri tapi harus melakukan kerjasama dengan orang lain yang mempunyai ide dan tujuan yang sama, dengan melakukan administrasi maka tujuan tersebut akan tercapai.

Menurut Siagian (2003;2) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang defenisinya tidak terbatas pada pekerjaan catat mencatat saja tapi administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya demi mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Menurut Nawawi (dalam Syafiie 2003;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Atmosudirjo (dalam Zulkifli 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Menurut John M.Pfiffer dan Robert V administrasi publik adalah suatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan Negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.

Menurut Leonard D.White administrasi publik adalah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Negara.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Menurut Siagian (2003;6) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Syafri (2012;12) organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktifitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Sukses atau tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan organisasi yang baik.

Yang dimaksud organisasi adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri yang telah dirumuskan oleh Siagian (2003;97) sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relative permanen.
10. Adanya jaminan jabatan.
11. Imbalan yang diberikan setiap orang harus setimbang dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Menurut Fahmi (2013;1) Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam fahmi 2013;2) Organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif yang dapat diidentifikasi yang bekerja atas atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut Siagian (dalam Zulkifli 2009;17) Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya

pencapaian tujuan dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk mencapai aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli 2009;17) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Waldo (dalam Zulkifli 2009;17) Manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu system administrasi.

Menurut George R. Terry (dalam syafii 2006;17) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Zulkifli (2009;40) focus study manajemen adalah menciptakan aktivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama-sama manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi.

Manajemen dinyatakan dalam 6 M, Brantas (2009;13) Man, Money, Methods, Materials, Machines, and market. Namun, pada unsur Man (manusia) ini merupakan unsur yang sangat penting dari pada unsur lainnya, karena manusia sebagai penggerak atau pelaksana dari pada unsur-unsur manajemen lainnya.

Menurut Nor Ghofur (2014) Manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen public juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Donovan dan Jackson (1991) Manajemen publik adalah aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (*skill*).

4. Konsep Manajemen Strategis

Menurut Bateman (2006;5) Manajemen strategis (*strategic management*) dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.

Menurut David (2006;6) Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksplorasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang (*perencanaan jangka panjang*) dan mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untuk masa datang.

Menurut David (2006;6-8) proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Formulasi Strategis

Formulasi strategis termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan/instansi pemerintah, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

2. Implementasi strategi

Masyarakat instansi pemerintah/perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai atau karyawan, dan mengalokasikan sumberdaya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan.

3. Evaluasi Strategi

Adalah tahap final dalam manajemen startegis. Manajer sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi dimasa datang karena factor internal dan eksternal secara konstan berubah.

Secara historis, manfaat utama manajer strategis membantu organisasi memformulasikan strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional untuk pilihan strategi (david 2006;20).

5. Konsep Visi dan Misi

Menurut Tripomo et.al (2005;65) Visi adalah mewujudkan bayangan, keinginan, atau cita-cita akan menjadi seperti apa organisasi dimasa depan. Visi organisasi menggambarkan posisi atau peluang besar yang mungkin diraih dimasa depan. Catatan lain dari visi menurut Tripomo et.al (2005;65) adalah :

1. Visi menunjukkan arah strategis.
2. Visi lebih menunjukkan apa yang ingin di capai (what) bukan bagaimana mencapainya.
3. Seperti pernyataan “tujuan angka panjang”, visi bisa berupa hasil akhir, dan bisa juga berupa kemampuan.
4. Visi dan goal berbeda dalam jangka waktu pencapaian.

5. Visi merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimana seharusnya bentuk organisasi dimasa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder penting lainnya.

Menurut Hubeis et.al (2008;25) Visi adalah mimpi atau harapan yang ingin diwujudkan dimasa depan. Visi memberikan gambaran jelas mengenai kemana arah organisasi melangkah. Tanpa visi, suatu organisasi tidak memiliki pegangan ataupun panduan mengenai jalan masa depan organisasi yang ingin diciptakan. Oleh karena itu, organisasi perlu merumuskan visi yang mudah dipahami, bersifat memberikat spirit, dan berdimensi jangka panjang.

Selanjutnya menurut Tripomo et.al (2005;58) Misi adalah pernyataan yang menunjukkan maksud didirikan atau dibentuknya organisasi dan lingkup bisnis atau kegiatan yang harus dijalankan atau yang justru tidak boleh dijalankan oleh organisasi.

Tripomo et.al (2005;59) Menyatakan bahwa kelemahan pernyataan misi yang sering dijumpai adalah sebagai berikut :

1. Seringkali pernyataan misi tidak menunjukkan keunikan karena tidak dapat membedakannya dengan organisasi lain.
2. Pernyataan misi terlalu panjang, sulit diingat dan dipahami.
3. Tidak berhasil menjadi inspirasi bagi karyawan.
4. Tidak cukup luas sehingga tidak mampu mengantisipasi pertumbuhan.
5. Tidak cukup sempit untuk memfokuskan arah pergerakan organisasi.
6. Misi ditunjukkan hanya untuk formalitas.

Menurut Hubeis et.al (2008;68) Misi merupakan pernyataan yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai alasan dasar keberadaan organisasi atau penjelasan lebih jauh dan operasional dari visi organisasi atau pernyataan yang komprehensif mengenai bagaimana visi akan diwujudkan.

6. Konsep Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2006;3) Akuntabilitas Publik adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2001;8) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mahmudi (2010;23) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).

Menurut Syahrudin Rasul (2002;8) Akuntabilitas Publik adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

7. Konsep Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Winarno 2007;18) Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Friendrick (dalam Indiahono 2008;19) Mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Indiahono (2009;18) Kebijakan dipandang sebagai sebuah siklus yang dimungkinkan akan terjadi evolusi kebijakan. Sebuah kebijakan akan melewati serangkaian proses implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kebijakan akan lahir kembali dengan perubahan secara incremental dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan yang mendasar meskipun amat jarang terjadi.

8. Pembangunan (Development) Perkotaan

Pembangunan (*Development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

Menurut Siagian (1994) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencanaan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan Perkotaan adalah Pembangunan-pembangunan yang bertujuan untuk menata kota agar dapat menjadi berkembang, seperti pembangunan-pembangunan fasilitas kota, namun pembangunan tersebut menurut saya tidak seimbang dengan kelestarian lingkungan, namun karena

demi tercapainya kemudahan-kemudahan bagi manusia hal itu di abaikan (Maulidiani A.S).

9. Konsep Perencanaan Pembangunan

Menurut Zulkifli (2009;49) Perencanaan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan merealisasikan suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Allen (dalam Zulkifli 2009;49) bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perencanaan pada hakikatnya adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki beserta langkah-langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi-kondisi tersebut. Frasa kunci yang terdapat dalam defenisi tersebut adalah pemilihan sekarang dan yang kita hendaki. Dalam mewujudkan masa depan yang kita hendaki, kita harus melakukan pemilihan sekarang bukan pada masa depan.

Menurut Arthur W. Lewis Perencanan Pembangunan adalah Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah Perencanaan Pembangunan adalah Sustu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktivitas kemasyarakatan, baik

yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

10. Konsep Pelaksanaan

Menurut George R. Terry (2009;17) jika dikaitkan dengan penjelasan administrasi dan manajemen ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam proses administrasi dan manajemen. Karena administrasi merupakan segenap aktivitas organisasi yang bersangkutan dengan penggunaan tenaga kerja secara bersama untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Sedangkan manajemen sendiri memiliki hubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi merupakan implementasi dari penerapan proses administrasi dan manajemen.

Menurut Purwanto et.al (2012;21) Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2006;126) Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan ke bawah.

Menurut Terry (dalam Syafiie 2006;81) Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan menejerial dan usaha-usaha organisasi.

11. Konsep Evaluasi

Menurut William N. Dunn (2003;608) Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai kebijakan dan program. Atau secara umum dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Adapun kriteria-kriteria evaluasi menurut William N. Dunn meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*Effectiveness*), apakah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Efisiensi (*Efficiency*), penggunaan sumber daya yang ada secara optimal atau maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diinginkan.
3. Kecukupan (*Adequacy*), seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah yang ada.

4. Pemerataan/Kesamaan (*Equity*), kebijakan didistribusikan secara adil dan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
5. Responsivitas (*Responsiveness*), berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan (*Appropriatenes*), hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut Nurcholis (2005;169) Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Adapun menurut Wirawan (2011;7) evaluasi itu adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

12. Evaluasi Program

Menurut Kunarjo (2002;261) Perencanaan program bertujuan untuk mencari mencari solusi terhadap permasalahan khusus untuk berkembang di kalangan masyarakat, seperti program iminisasi balita, program penanggulangan banjir, program keluarga berencana, program penanggulangan wabah dalam demam berdarah dan lain sebagainya. Program pengendalian banjir misalnya, bagaimana pemerintah atau masyarakat dapat segera merehabilitasi akibat

bencana banjir melalui perencanaan kegiatan pemindahan penduduk, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, pembuatan talud sungai, dan kegiatan lain yang sifatnya mengembalikan kondisi seperti semula dan mencegah terulangnya bencana yang sama.

Pada prinsipnya penanganan perencanaan “program” dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan dan permasalahan yang bersangkutan. Karena luasnya lingkup program, maka cara penanganannya melalui pembangunan lebih dari satu proyek atau kegiatan dalam suatu keterpaduan.

Untuk mengevaluasi suatu program, tidak ada devinisi tertentu dan tidak mempunyai keseragaman dalam penerapannya. Apakah program itu berhasil atau tidak berhasil, pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang langsung dalam suatu survey, melalui observasi, wawancara, atau daftar pertanyaan yang diambil secara sampling.

Tujuan Evaluasi program Kunarjo (2002;268) Program yang telah selesai dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan itu sudah tepat. Evaluasi program bertujuan :

- a. Mempertanggungjawabkan keberhasilan program kepada masyarakat atau instansi yang membiayai program yang bersangkutan dan
- b. Keberhasilan maupun ketidakberhasilan program ini selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh mereka yang berwenang.

Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah berupa keputusan tentang :

- a. Apakah program dapat dikembangkan lebih lanjut atau dialihkan ke program lain.
- b. Alternatif mana yang memungkinkan program ini dapat dialihkan ke program yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif.
- c. Apabila program tersebut terpaksa dialihkan, strategi apa yang diterapkan untuk menggeser sumber yang kurang efisien ke sumber yang lebih efisien.

Jadi evaluasi program itu berorientasi ke depan yaitu dalam rangka pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam evaluasi program ini dapat dibagi dalam 4 kelompok yaitu :

Pertama, situasi sebelum program dilaksanakan

Untuk mengetahui situasi program sebelum dilaksanakan, perlu dibandingkan program sekarang dan program sebelumnya. Program sebelumnya dapat dilihat dalam dokumen perencanaan, hasil survey awal, studi kelayakan yang telah dibuat, dan sumber-sumber lainnya.

Kedua, konsep program yang bersangkutan

Bagaimana me-review konsep program yang sedang berjalan, dengan kata lain apakah program yang kita laksanakan cukup masuk akal, dan dapat diberikan alasan bahwa program tersebut telah dipilih sebagai program yang terbaik.

Ketiga, mendesain program yang bersangkutan

Untuk dapat mengevaluasi program, perlu dikaji lebih dulu desain program yang bersangkutan agar secara sistematis program tersebut

direncanakan secara benar. Suatu program harus mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus diciptakan kegiatan atau proyek yang menghasilkan produk. Kegiatan atau proyek itu lebih dari satu yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai sasaran program.

Keempat, aspek perencanaan secara kualitatif

Program terdiri dari beberapa proyek atau kegiatan. Produk atau output dari proyek-proyek tersebut berupa fisik maupun non fisik, seperti gedung, jalan dan jembatan, peralatan, dan lain sebagainya. Kecuali itu produk (output) juga dapat pelayanan, pelatihan, konsultasi, dan lain-lain. Produk (output) tersebut tergantung dari tujuan suatu program.

Pemantauan dan Evaluasi menurut Kunarjo (2002;269) Monitoring atau pemantauan biasanya dimulai sejak dalam pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan setelah program selesai. Pemantauan perlu dilakukan secara terus-menerus meliputi semua aspek sejak dari pelaksanaan proyek. Pemantauan ini diharapkan dapat memberikan informasi terutama untuk membantu mengembangkan kemajuan pelaksanaan, agar penyimpangan dapat diketahui lebih dini, dan solusi dapat dilakukan lebih cepat.

Perbedaan pemantauan dan evaluasi

- a. Mencatat kegiatan secara terus-menerus selam dalam pelaksanaan.
- b. Mencatat hasil setiap periode (tahunan, bulanan) disesuaikan dengan yang direncanakan dalam dokumen proyek.
- c. Mencocokkan antara biaya yang dikeluarkan dengan sasaran fisik yang dicapai.

- d. Membuat laporan kemajuan yang sekarang dalam selang waktu yang pendek untuk mengoreksi apabila ada penyimpangan.
- e. Mengambil tindakan apabila antara pembiayaan dan sasaran fisik tidak sesuai.
- f. Mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusinya.

Adapun evaluasi mencakup tugas :

- a. Me-review kegiatan yang telah dikerjakan melalui studi yang mendalam.
- b. Me-review program secara keseluruhan untuk tujuan pengambilan keputusan.
- c. Mengukur kinerja proyek secara objektif.
- d. Menekankan pencapaian objektif secara menyeluruh.
- e. Menyiapkan laporan kinerja untuk keperluan pengambilan keputusan di masa datang.

Review menurut Kunarjo (2002:270) dalam rangka pengambilan keputusan, program perlu diadakan peninjauan kembali tentang masalah yang mungkin dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang. Review ini meliputi semua proyek terutama mengenai inputnya, prosesnya, dan outputnya.

Review terhadap input

Apa yang telah dilaksanakan terutama mengenai inputnya perlu dilihat kembali tentang hambatan yang pernah terjadi dalam pengadaan input ini, misalnya, tentang ketenagakerjaan, bahan mentah, dan factor-faktor produksi lainnya.

Review terhadap proses

Dalam review terhadap proses perlu dijawab pertanyaan :

- a. Tentang ruang lingkup pekerjaan. Apakah perubahan ruang lingkup pekerjaan ini disbanding dengan rencana semula.
- b. Apakah perubahan ruang lingkup itu dapat menjamin berhasilnya tujuan utama program, misalnya tentang kualitas, output, biaya, dan waktu.

Review terhadap output

Output adalah hasil dari effect dan impact. Effect dan impact yang bersangkutan dapat disamakan dengan istilah outcome untuk membedakan dengan istilah output. Output tidak selalu merupakan suatu factor yang bisa dicapai secara outcome.

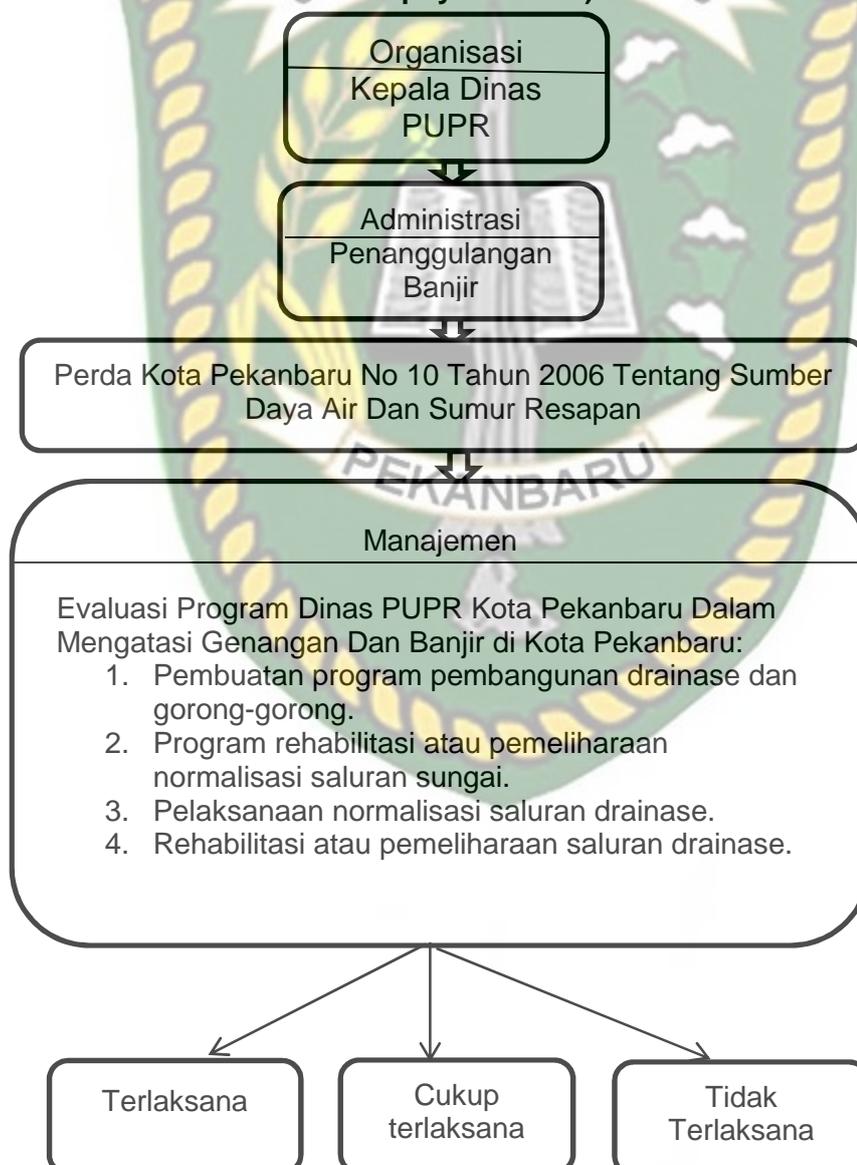
Adapun indikator menurut Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru :

1. Pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong.
2. Program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai.
3. Pelaksanaan normalisasi saluran drainase.
4. Rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori yang diterangkan, maka dapat disusunlah gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Seperti pada gambar 1.1 Berikut ini :

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai).



Sumber : Hasil modifikasi penulis 2018

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, fenomena empiris, dan beberapa penjelasan konsep teoritis maka penulis dapat merumuskan hipotesis yaitu “ **Diduga bahwa Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai) belum sepenuhnya dapat mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru atau Hasilnya Bisa Dikatakan “Cukup Terlaksana”.**

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahan pemahaman penelitian ini, maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variable. Adapun konsepnya itu adalah :

1. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana yang ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.
3. Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan

tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh Sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berkenan berusaha untuk mencapi sasaran agar sesuai dengan perencanaan menejerial dan usaha-usaha organisasi.
5. Manajemen strategis (strategic management) dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.
6. Strategi adalah rencana tentang apa yang diinginkan dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi dimasa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut.
7. Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, peraturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencanaan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).
9. Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan perkiraan yang mendekat sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan dikemudian hari dengan menentukan apa (what) yang akan dikerjakan, kapan (when) akan dikerjakan, siapa (who)

yang mengerjakannya, dimana (where) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.

10. Menurut Kunarjo (2002;261) Evaluasi program adalah program yang telah selesai dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan sudah tepat. Adapun indicator yang digunakan adalah pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong, program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pelaksanaan normalisasi saluran drainase, rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase.
11. Visi adalah menunjukkan bayangan, keinginan, cita-cita akan menjadi seperti apa organisasi dimasa depan. Visi organisasi menggambarkan posisi atau peluang besar yang mungkin diraih dimasa depan.
12. Misi adalah pernyataan yang menunjukkan maksud didirikan atau dibentuknya organisasi dan ruang lingkup bisnis atau kegiatan yang harus dijalankan atau yang justru tidak boleh dijalankan oleh organisasi.
13. Drainase adalah merupakan salah satu fasilitas dasar atau sarana dan prasarana yang berfungsi mengalirkan air dan dirancang sebagai system guna menangani banjir dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.
14. Drainase primer adalah adalah saluran air yang dibangun oleh instansi terkait dengan memanfaatkan aliran anak sungai yang sudah ada dan juga merupakan saluran air yang menampung air yang berasal dari saluran drainase sekunder.

15. Drainase sekunder adalah saluran drainase yang mengalirkan air menuju kesaluran drainase primer yang sengaja dibuat untuk menampung air hujan maupun air yang berasal dari masyarakat sekitar.
16. Kanal merupakan saluran air yang dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan. Umumnya kanal merupakan bagian dari aliran sungai dengan pelebaran atau pendalaman. Kanal biasanya difungsikan sebagai pengendalian banjir serta berguna untuk jalur transportasi atau perdagangan. Kanal juga biasanya dibangun untuk menghubungkan dua aliran sungai untuk kepentingan pelayaran antar daerah.
17. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
18. Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan manusia. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat oleh manusia.
19. Gorong-gorong (box culvert) adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air yang terbuat dari berbagai jenis material seperti baja dan beton.
20. Pintu air adalah bangunan penunjang untuk mengendalikan banjir atau bisa digunakan untuk mengontrol aliran air disungai serta digunakan untuk menurunkan muka air banjir pada sungai atau pada saluran air pada saat terjadinya banjir.
21. Banjir adalah kondisi air yang menggenangi suatu area atau tempat yang luas atau terendamnya daratan yang semula tidak terendam air

menjadi terendam akibat volume air yang bertambah yang disebabkan oleh meluapnya sungai maupun saluran air.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Banjir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
1. Menurut Kunarjo (2002;261) Evaluasi program adalah program yang telah selesai dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan sudah tepat.	Evaluasi Program	1. Pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong.	1. Melaksanakan program pembangunan drainase dan gorong-gorong. 2. Melakukan pembangunan drainase dan gorong-gorong dengan baik oleh (PUPR). 3. Melaksanakan pembangunan drainase dan gorong di wilayah yang sering terjadi banjir dan yang jarang terkena banjir khususnya di Kecamatan Marpoyan damai. 4. Meningkatkan kualitas dan jumlah pembangunan drainase dan gorong-gorong.	Terlaksana. Cukup terlaksana. Tidak terlaksana.
		2. Program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran	1. Melakukan penggerukan sampah pada saluran sungai. 2. Melaksanakan program rehabilitasi atau pemeliharaan	

sungai.

normalisasi saluran
sungai.

3. Meningkatkan intensitas penggerakan sampah pada saluran sungai.
4. Melakukan penggerakan saluran sungai yang sudah mulai diangkat.

3. Pelaksanaan normalisasi saluran drainase.

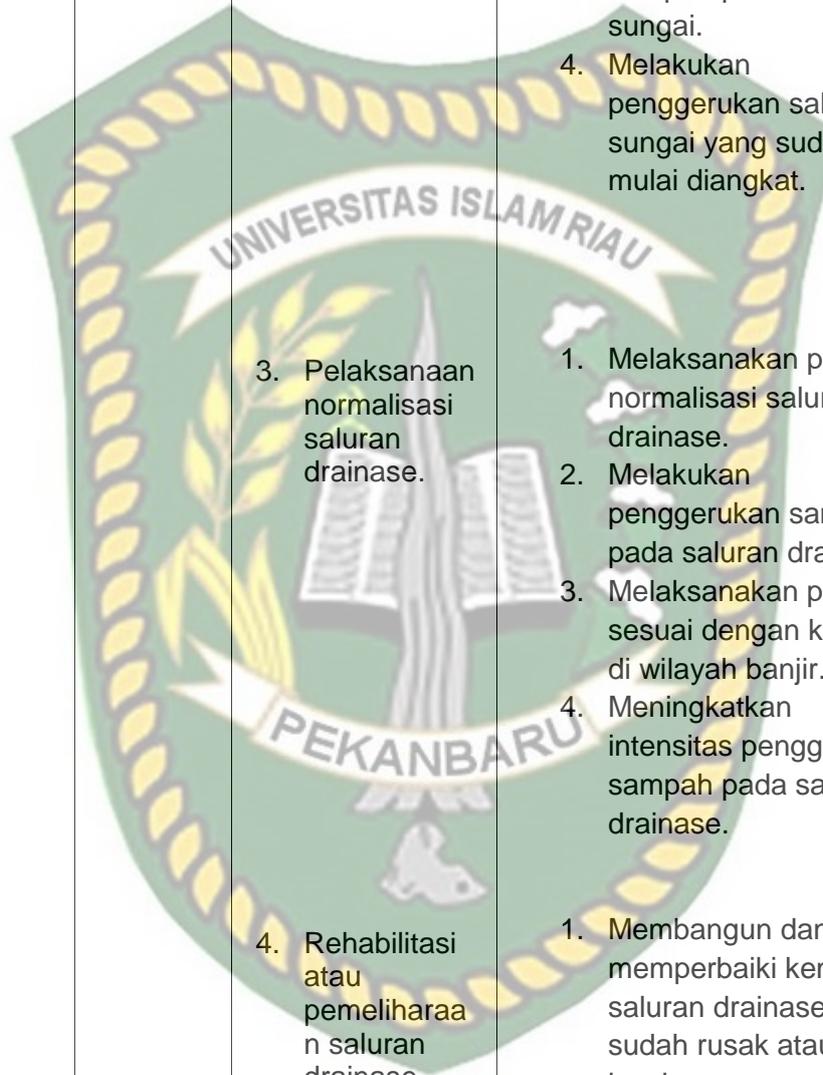
1. Melaksanakan program normalisasi saluran drainase.
2. Melakukan penggerakan sampah pada saluran drainase.
3. Melaksanakan program sesuai dengan kondisi di wilayah banjir.
4. Meningkatkan intensitas penggerakan sampah pada saluran drainase.

Terlaksana.
Cukup terlaksana.
Tidak terlaksana.

4. Rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase.

1. Membangun dan memperbaiki kembali saluran drainase yang sudah rusak atau tidak layak.
2. Mengecek secara rutin kondisi saluran drainase yang ada di kota pekanbaru.
3. Dinas PU bekerja dengan baik dan maksimal dalam mengatasi genangan dan banjir.
4. Membersihkan area sekitar saluran

Terlaksana.
Cukup terlaksana.
Tidak terlaksana.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

			drainase yang dapat menghambat jalannya air.	
--	--	--	--	--

Sumber : Modifikasi penulis Tahun 2018.

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap perencanaan variable dan indicator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu : terlaksana, cukup terlaksana, tidak terlaksana. Adapun teknik digunakan dalam variable penelitian adalah sebagai berikut :

Terlaksana : Jika secara garis besar responden sejalan sama dengan indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru penilaian berkisar antara rata-rata 67-100%

Cukup Terlaksana : Jika hanya sebagian saja dari responden yang mendukung indicator. Evaluasi

Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada nilai rata-rata 34-66%

Tidak Terlaksana : Jika sebagian kecil saja responden menyetujui indikator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada level rata-rata 1-33%

Adapun pengukuran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong.

Terlaksana : Jika secara garis besar responden sejalan sama dengan indikator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru penilaian berkisar antara rata-rata 66-100%

Cukup terlaksana : Jika hanya sebagian saja dari responden yang mendukung indikator. Evaluasi

Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada nilai rata-rata 34-66%

Tidak terlaksana : Jika sebagian kecil saja responden menyetujui indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada level rata-rata 1-33%

2. Program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai.

Terlaksana : Jika secara garis besar responden sejalan sama dengan indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada nilai rata-rata 66-100%

Cukup terlaksana : Jika hanya sebagian saja dari responden mendukung indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota

Pekanbaru berada pada nilai rata-rata 34-66%

Tidak terlaksana : Jika sebagian kecil saja responden menyetujui indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada level rata-rata 1-33%

3. Pelaksanaan normalisasi saluran drainase.

Terlaksana : Jika secara garis besar responden sama dengan indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru penilaian berkisar antara rata-rata 66-100%

Cukup terlaksana : Jika hanya sebagian saja responden mendukung indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada nilai rata-rata 34-66%

Tidak terlaksana : Jika sebagian kecil saja responden menyetujui indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada level rata-rata 1-33%

4. Rehabilitasi atau pemeliharaan saluran Drainase.

Terlaksana : Jika secara garis besar responden sejalan sama dengan indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru penilaian berkisar antara rata-rata 66-100%

Cukup terlaksana : Jika hanya sebagian saja dari responden mendukung indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada nilai rata-rata 34-66%

Tidak terlaksana : Jika sebagian kecil saja dari responden mendukung indicator. Evaluasi Program Dinas pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dan genangan di kota Pekanbaru berada pada level rata-rata 1-33%



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, penelitian ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dimana sampel ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian. Serta mengutamakan alat pengumpulan data daftar kusioner dan daftar pedoman wawancara sebagai alat dasar untuk menjelaskan variable penelitian dan pengaruhnya bertitik tolak dari pemanfaatan data tersebut maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian. Menurut Sugiyono (2012;11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya. Dengan metode kuantitatif penelitian metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan untuk mengakumulasi atau mengumpulkan data, mengklarifikasi dengan menganalisanya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian adalah di sekitar Kecamatan Marpoyan Damai. Pemilihan penelitian di kantor Dinas tersebut karena merupakan yang bertugas dan memiliki kewenangan serta kewajiban

untuk melaksanakan kegiatan evaluasi program dalam mengatasi genangan dan banjir.

Adapun lokasi banjir yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah di sekitar Kecamatan Marpoyan Damai. Alasan ini peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut adalah karena penulis menemukan adanya fenomena masih terjadinya banjir dan genangan apabila musim hujan, ini merupakan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir di Kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai yaitu Jalan kaharuddin Nasution, Jalan Sudirman, Jalan Sembilang, Jalan Garuda, dan sebagainya.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90).

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dari peneliti ini adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Kepala bidang program penanggulangan genangan dan banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Kepala Seksi program penanggulangan genangan dan banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, dan masyarakat pengguna jalan yang ada di Kota Pekanbaru penulis jadikan sebagai *key informan* dalam penelitian ini. Untuk lebih detailnya masalah populasi dan sampel ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas PUPR	1	1
2	Kepala Bidang SDA (Sumber Daya Air).	1	1
3	Kepala Perencanaan dan Pengawasan dan Evaluasi SDA	2	2
4	Masyarakat pengguna program di wilayah proyek banjir kecamatan marpoyan damai yakni :	125	20
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak/Ibu petugas kebersihan/pasukan kuning di Kota Pekanbaru yang membantu Dinas PUPR dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru. 2. Mahasiswa. 	1.000	10
Jumlah		1.125	34

Sumber : Modifikasi penulis Tahun 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir di kota Pekanbaru yaitu penarikan sampel untuk kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, kepala bidang program perencanaan dan pengawasan dan kepala seksi perencanaan dan evaluasi yang jumlah populasinya relative sedikit maka penarikan sampel menggunakan metode sensus yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

Sedangkan penarikan sampel untuk lokasi yang menjadi objek penelitian menggunakan teknik penarikan sampel secara purposive sampling yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2012;96). Lokasi atau wilayah yang diteliti adalah Kecamatan Marpoyan Damai. Alasan peneliti memilih Kecamatan Marpoyan Damai tersebut menjadi objek peneliti karena wilayah tersebut masih sering banjir jika terjadi hujan.

Kemudian penarikan sampel untuk masyarakat pengguna jalan di kota Pekanbaru menggunakan metode accidental sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai ketika peneliti melakukan penelitian dilapangan. Menurut Sugiyono (2012;96) sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan / incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data.

E. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden meliputi hasil kusioner yang berkenaan dengan evaluasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru. Yang diambil langsung dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru serta hasil wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru untuk melengkapi dan memperjelas data hasil kusioner.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data dan informasi yang berkaitan dengan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini berupa visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, daftar urut kepangkatan dan standar operasional prosedur (SOP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, serta data-data tentang evaluasi program yang sedang dijalankan atau digunakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner (angket) yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variable penelitian dan kemudian disebarakan kepada responden yang dijadikan sampel yang penelitian ini serta tentang apa saja yang akan di tanyakan.
- b. Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti memberikan dialog dan pertanyaan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berkenaan dengan masalah yang ada seperti berapa dana yang dihabiskan untuk memperbaiki saluran drainase, saluran sungai serta yang lainnya, apa saja yang menjadi hambatan dalam memperbaiki saluran drainase yang rusak, apa saja yang menyebabkan banjir dan genangan semakin hari semakin meningkat.

- c. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung obyek yang diteliti digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empiric khususnya yang menjadi objek penelitian di sekitar Kecamatan Marpoyan Damai.
- d. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian, melalui dokumentasi terkait. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian bahan bukti dan bahan analisa seperti foto-foto yang telah dilampirkan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini seluruh data yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan teknik analisis statistic deskriptif, data-data yang peneliti peroleh dikelompokkan dalam bentuk tabel-tabel. Dari data yang dikelompokkan dalam tabel-tabel tersebut kemudian peneliti dapat menganalisanya dengan cara menghubungkannya kedalam teori-teori yang telah peneliti kutib dari para ahli sehingga hasilnya penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang baik dalam penelitian ini

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang evaluasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di kota Pekanbaru lihat tabel berikut :

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kusioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komperensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 kota Pekanbaru pada saat ini terdiri dari 12 Kecamatan yakni Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Bukit Raya, Sukajadi, Senapelan, Tenayan Raya, Sail, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan, Lima Puluh dan Payung sekaki serta terdiri dari 58 kelurahan/desa. Sedangkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah kurang lebih 632,26 Km². Adapun batas-batas wilayah administrative kota Pekanbaru yaitu:

-) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
-) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
-) Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Berikut adalah visi dan misi jangka menengah Kota Pekanbaru tahun 2014-2018:

Visi

Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang medani

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat local, nasional, maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatahat yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dengan iklim usaha yang kondusif.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur yang memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan sungai Sail. Sungai siak juga merupakan jalur penghubung lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta daerah lainnya.

Panjang jalan kota Pekanbaru yaitu kurang lebih 2.463 km, hamper 25 persennya dalam keadaan rusak, dengan penambahan jumlah penduduk kota Pekabaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga sangat pesat. Selain itu dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama disepanjang jalan Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan lalu lintas Kota Pekanbaru.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 C – 35,6 C dan suhu minimum antara 20,2 C – 23,0 C. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 43,5 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

-) Musim hujan jatuh pada bukan Januari s/d April dan September s/d Desember.
-) Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring dengan banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru harus serius dalam menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum, dan lainnya sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin. Dengan meningkatkan kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah Suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Minang,

Batak, Tionghoa, dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk Kota Pekanbaru pada umumnya adalah pegawai swasta, pegawai pemerintahan, dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di 12 kecamatan yaitu terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017.

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pekanbaru Kota	14.348	14.454	28.892
2	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
3	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
4	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
5	Tenayan Raya	56.599	55.470	112.092
6	Tampan	89.344	86.290	175.634
7	Sail	11.271	11.517	22.793
8	Senapelan	17.694	22.852	36.014
9	Payung sekaki	36.546	38.707	74.253
10	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
11	Rumbai	35.582	32.144	66.943
12	Rumbai pesisir	34.321	32.722	67.033
	Jumlah	458.059	446.020	887.348

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017.

No	Kecamatan	0-6 th	7-12 th	13-15 th	16-17 th	18 th	19-24 th	>24 th
1	Pekanbaru Kota	2.570	1.097	1.663	894	481	2.589	19.116
2	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
3	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
4	Sukajadi	4.675	7.500	3.074	2.932	1.652	3.580	29.320
5	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
7	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
8	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
9	Payung sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
10	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
11	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.532	31.258
12	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.532
	Jumlah	190.551	99.923	67.201	68.014	35.151	117.952	420.250

Sumber : Badan Pusat statistic Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang di pilih langsung oleh masyarakat Kota Pekanbaru dengan masa pemerintahan selama 5 tahun. Penyelenggaraan roda pemerintah kota Pekanbaru di pusatkan di kantor walikota Kota Pekanbaru yang berada dijalan Sudirman. Susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Pada awalnya Kota Pekanbaru terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa yang berdasarkan peraturan pemerintah No.19 tahun 1987.

Kemudian seiring perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat maka untuk lebih terciptanya tertin pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam penggunaan fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 04 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Daftar Nama 12 Kecamatan Beserta Kelurahan Di Kota Pekanbaru.

NO	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	Pekanbaru Kota	a. Simpang empat b. Sumahilang c. Tanah Datar d. Kota Baru e. Suka Ramai f. Kota Tinggi
2	Bukit Raya	a. Simpang tiga b. Tangkerang Selatan c. Tangkerang utara d. Tangkerang Labui
3	Marpoyan Damai	a. Tangkerang Tengah b. Tangkerang barat c. Maharatu d. Sidomulyo Timur e. Wonorejo
4	Sukajadi	a. Jatirejo b. Kampung tengah c. Kampung melayu d. Kedungsari e. Harjosari f. Sukajadi g. Pulau Koran
5	Tenayan Raya	a. Kulim (Tangkerang timur) b. Rejosari c. Sail
6	Tampar	a. Simpang baru b. Sidomulyo barat c. Tuah karya d. Delima

NO	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
7	Sail	a. Cita raja b. Suka maju c. Suka Mulia
8	Senapelan	a. Padang bulan b. Padang terubuk c. Sago d. Kampung dalam e. Kampung Bandar f. Kampung baru
9	Payung Sekaki	a. Labuh Baru Timur b. Tampan c. Air Hitam d. Labuh Baru
10	Lima Puluh	a. Rintis b. Sekip c. Tanjung RHU d. Pesisir
11	Rumbai	a. Limbun Sari b. Muara Fajar c. Rumbai Bukit d. Palas e. Sri Meranti
12	Rumbai Pesisir	a. Meranti Pendek b. Limbungan c. Lembah Sari d. Lembah damai e. Limbungan Baru f. Tebing Tinggi Okura

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanaan pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pekanbaru No.8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas-Dinas Pemerintahan Kota Pekanbaru yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas PUPR
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Sekertariat
 - a) Sub bagian penyusunan program
- d. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
 - a) Bidang Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi SDA.
- e. Bidang perencanaan dan pengawasan
 - a) Seksi perencanaan teknis
 - b) Seksi evaluasi, monitoring, dan pelaporan
- f. Bidang air bersih
 - a) Seksi air bersih
- g. Bidang bangunan gedung pemerintah
 - a) Seksi Pembangunan

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

1. Kepala Dinas PUPR mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang PUPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang PUPR.
- c. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- d. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Dinas PUPR menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pemeriksaan tugas.
- d. Pengevaluasian tugas.

3. Sekertariat Dinas PUPR mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaiaan, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- c. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- d. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tulisan.

4. Sekertariat Dinas PUPR menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, Perumusan, dan pelaksanaan program kerja.
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi.
- c. Pemeriksaan pekerjaan.
- d. Pengevaluasian tugas.

5. Bidang Sumber Daya Air (SDA) mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja sumber daya air (SDA) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap sumber daya air dalam pelaksanaan program yang dilakukan.
- c. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tulisan.

6. Bidang Sumber Daya Air (SDA) mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pemeriksaan tugas.
- d. Pengevaluasian tugas.
- e. Pelaporan Pelaksanaan tugas.

7. Sub Bagian Penyusunan Program Dinas PUPR mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian penyusunan program berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program kerja serta merumuskan rencana kerja tahunan (RKT) penetapan kerja, LAKIP, Renstr, reja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan.
- c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas.
- d. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan lebih lanjut.

8. Sub Bagian Penyusunan Program Dinas PUPR mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi.

- d. Pemeriksaan pekerjaan.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Pelaporan Pelaksanaan tugas.

9. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja bidang perencanaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasi dan merumuskan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan lebih lanjut.

10. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas PUPR mempunyai rincian :

- a. Penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program kerja.
- b. Pengendalian dan pengawasan.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- d. Pemeriksaan pekerjaan.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Pelaporan Pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan dan pengawasan terdiri dari :

- a. Seksi perencanaan teknis.
- b. Seksi evaluasi, monitoring, dan pelaporan.

11. Seksi Perencanaan Teknis mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja bidang perencanaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perencanaan teknik di bidang PUPR serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
- c. Merumuskan dan melaksanakan laporan pelaksanaan perencanaan teknik pengembangan jalan di bidang PUPR.

12. Seksi Perencanaan Teknis mempunyai rincian :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perencanaan teknik.
- c. Pemeriksaan pekerjaan.
- d. Pengevaluasian tugas.

13. Seksi Evaluasi, Monitoring dan pelaporan mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja evaluasi, monitoring dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Melakukan pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PUPR.

14. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- b. Penyusunan, pengolahan dan penyajian data.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- d. Pemeriksaan pekerjaan.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Pelaporan Pelaksanaan tugas.

15. Bidang Air Bersih Dinas PUPR mempunyai rincian :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program air bersih berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasi dan merumuskan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan peningkatan bidang penyehatan lingkungan dan air bersih.
- c. Mengkoordinasi dan merumuskan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan bidang air bersih.
- d. Mengkoordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan air bersih.

16. Bidang Air Bersih Dinas PUPR mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- b. Penyusunan, pengolahan dan penyajian data.
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- d. Pemeriksaan pekerjaan.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Pelaporan Pelaksanaan tugas.

17. Seksi Air Bersih mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi air bersih berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana air bersih yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.

18. Seksi Air Bersih mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Penyelenggaraan system air bersih.
- c. Pengkoordinasi dan fasilitasi.
- d. Pemeriksaan pekerjaan.
- e. Pengevaluasian tugas.

19. Bidang Bangunan dan Gedung Dinas PUPR mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja dibidang bangunan gedung pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dibidang pengendalian tata letak bangunan, detail struktur dan arsitektur bangunan.
- c. Melaksanakan perencanaan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang bangunan gedung.
- e. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

20. Bidang Bangunan dan Gedung Dinas PUPR mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program.
- a. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan monitoring evaluasi.
- c. Pengkoordinasi dan fasilitasi.
- d. Pemeriksaan pekerjaan.
- e. Pengevaluasian tugas.

21. Seksi Pemabngunan mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja seksi pembangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan perencanaan dan pembangunan gedung.
- c. Melaksanakan bantuan teknis perencanaan pembangunan gedung, perbaikan dan rehabilitasi bangunan gedung.

- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan dan pembangunan bangunan gedung.
- e. Melakukan pemeriksaan dalam rangka penyiapan dan pemberian rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung.
- f. Merumuskan penilaian penafsiran harga bangunan gedung dan merumuskan kekuatan bangunan untuk perkantoran serta bangunan-bangunan tempat umum lainnya yang menyediakan pedoman harga standar bangunan gedung pemerintah.

22. Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Pelaksanaan tertib penyelenggaraan gedung.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional.
- d. Pengkoordinasi dan fasilitasi.
- e. Pemeriksaan pekerjaan.
- f. Pengevaluasian tugas.

D. Permasalahan Banjir Di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya jumlah peningkatan penduduk, pusat-pusat, perbelanjaan yang semakin meningkat, dan jumlah lahan terbuka hijau yang semakin tahun semakin menghilang yang menyebabkan sering terjadi banjir jika hujan lebat. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah Kota Pekanbaru dan perlu menjadi perhatian khusus bagi Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai instansi yang berkaitan dengan penanganan banjir di Kota Pekanbaru.

Selain itu kurangnya pemeliharaan drainase yang ada oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru maupun rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga

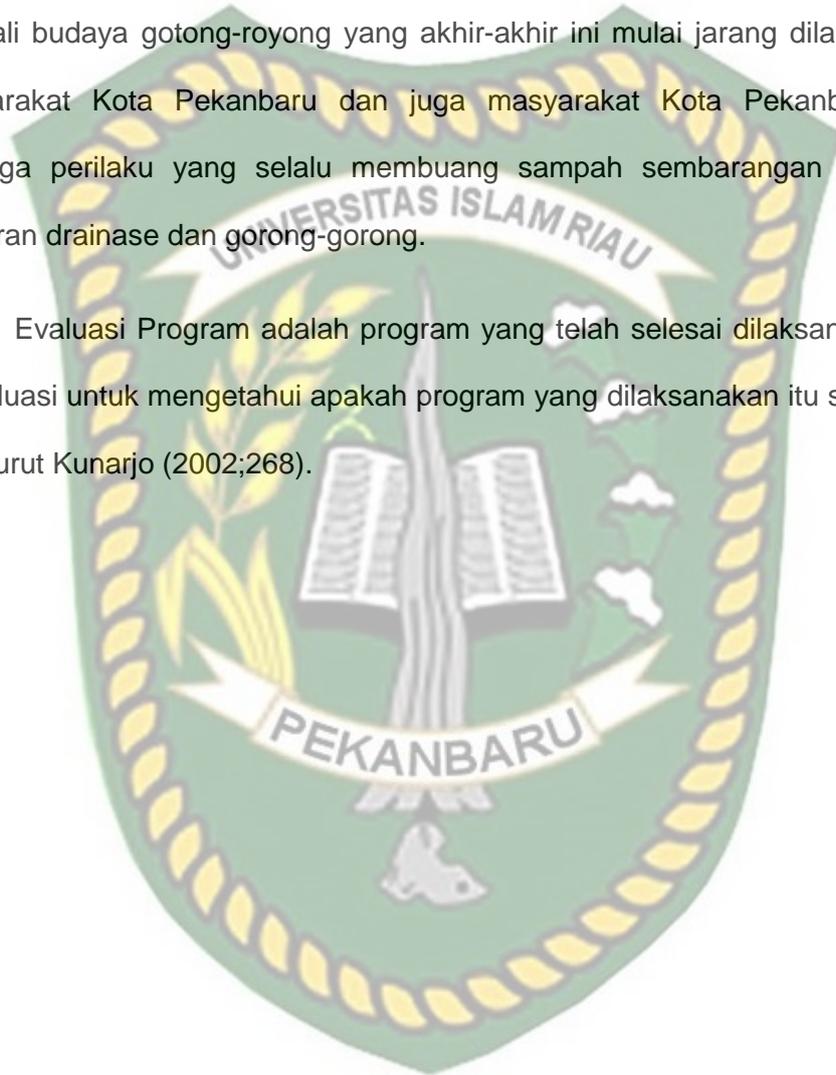
kondisi drainase dilingkungannya. Contohnya seperti yang ada di sepanjang jalan Kaharuddin Nasution Kecamatan Marpoyan Damai dimana banyaknya saluran drainase yang tersumbat oleh sampah maupun tanah. Dalam hal ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru kurang tanggap dalam mengatasinya karena apabila banjir sudah terjadi barulah mereka bekerja untuk membersihkan saluran drainase tersebut.

Dari segi sosial ekonomi dapat dikatakan bahwa meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, pemukiman/perumahan serta fasilitas pelayan pendukungnya sangat menguntungkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan maupun daerah sekitarnya. Namun disisi lain perkembangan Kota Pekanbaru pada masa akan datang apabila tidak terarah dan terkendali sesuai perencanaan tata kota yang telah ditetapkan dapat menimbulkan beberapa persoalan serius yang terjadi diperkotaan antara lain masalah kemacetan lalu lintas, masalah lingkungan kumuh pada masalah banjir dilingkungan pemukiman penduduk maupun di ruas jalan perkotaan.

Permasalahan banjir dan genangan air Kota Pekanbaru sampai saat ini merupakan masalah yang cukup serius karena akan mempengaruhi kehidupan kota baik dari segi sosial ekonomi maupun budaya. Kota Pekanbaru sampai saat ini masih sering dilanda banjir serta mengalami genangan yang cukup luas dan lama di setiap musim hujan. Oleh karena itu permasalahan banjir di Kota Pekanbaru ini tidak hanya menjadi permasalahan Dinas PUPR Kota saja tetapi juga Dinas-dinas yang terkait yang berada dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau.

Selain itu, masyarakat Kota Pekanbaru harus turut serta ikut bekerja sama dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru khususnya dalam menjaga saluran sungai dan drainase dengan cara-cara seperti menghidupkan kembali budaya gotong-royong yang akhir-akhir ini mulai jarang dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru dan juga masyarakat Kota Pekanbaru harus menjaga perilaku yang selalu membuang sampah sembarangan khususnya disaluran drainase dan gorong-gorong.

Evaluasi Program adalah program yang telah selesai dilaksanakan perlu di evaluasi untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan itu sudah tepat (menurut Kunarjo (2002;268).



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru. Dimana dalam pembahasan ini penulis melakukan analisa dengan menggunakan teori yang sesuai dengan indikator variable penelitian. Sebelum membahas mengenai indikator variable penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru terlebih dahulu kita melihat identitas responden penelitian.

A. Identitas Responden

Penelitian yang dilakukan merupakan penilaian tentang Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru. Dengan demikian untuk memenuhi data yang akurat dari responden yang mengetahui tentang program tersebut. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas PUPR, Kabid Perencanaan dan Pengawasan, Kasi Perencanaan Teknis, Kasi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, Staf-staf yang bersangkutan, dan masyarakat pengguna jalan ataupun pengguna program di sekitar proyek genangan dan banjir. Adapun karena Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan maka peneliti memilih 1 kecamatan diantaranya Kecamatan Marpoyan Damai. Identitas responden yang akan diidentifikasi terdiri dari jenis kelamin, usi, pendidikan dan pekerjaan. Ada 20 orang responden dari aparat pemerintah dan 4 orang

responden masyarakat sebagai pengguna jalan ataupun program di sekitar proyek genangan dan banjir. Jadi jumlahnya ada 24 responden yang di harapkan dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, karena validitas data menentukan hasil suatu penelitian, maka berikut ini akan menggambarkan profil dari responden penelitian.

B. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari para responden dari aparat pemerintah dan masyarakat jalan ataupun pengguna program di sekitar proyek genangan dan banjir. Klarifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aparat pemerintah	4	-	4
2	Masyarakat	24	6	30
Jumlah		28	6	34
Persentase		82%	18%	100%

Sumber : Peneliti Lapangan Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden atau sebesar 82% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 10 responden berjenis kelamin perempuan atau sebesar 18%. Denga tersebarnya responden pada jenis kelamin diharapkan data yang diperoleh mampu menggunakan fakta dilapangan.

C. Usia Responden

Tabel V.2 : Klarifikasi Responden Berdasarkan Usia :

NO	Tingkat Umur	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Aparat Pemerintah	Pengguna Program		
1	30-39	2	8	10	29,4%
2	40-49	-	12	12	35,3%
3	50-59	2	8	10	29,4%
4	60-69	-	2	2	5,9%
Jumlah		4	30	34	100%

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.2 dapat disimpulkan bahwa tingkatan usia responden mayoritas berusia 40-49 tahun dengan jumlah terbanyak yakni 12 orang atau setara dengan 35,3% dari jumlah responden penelitian.

D. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan wawancara dan kusioner yang disebarakan kepada responden maka diketahui bahwa tingkatan pendidikan para responden yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	Pendidikan	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Aparat Pemerintah	Pengguna Program		
1	SD/Sederajat	-	-	-	-
2	SMP/Sederajat	-	2	2	5,9%
3	SMA/Sederajat	-	16	16	47,1%
4	D3	-	4	4	11,8%
5	S1	2	7	9	26,4%
6	S2	2	1	3	8,8%
Jumlah		4	30	34	100%

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2018.

Dari tabel V.3 dapat dilihat bahwa responden aparat pemerintahan sama jumlah tingkat pendidikannya yaitu tamatan S2, sedangkan pada masyarakat

pengguna program rata-rata hanya tamatan SMA, hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru sudah mulai melakukan peningkatan taraf pendidikan bagi masyarakat, karena peningkatan taraf pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya guna.

E. Pekerjaan

Untuk informasi pekerjaan peneliti hanya menanyakan pertanyaan ini kepada masyarakat pengguna program mengatasi genangan dan banjir tersebut. Sedangkan para aparat pemerintahan peneliti hanya menanyakan jabatan para responden dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Klarifikasi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4 : Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Pekerjaan Khusus untuk Masyarakat.

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petugas Kebersihan	20	70%
2	Mahasiswa	10	30%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2018.

Pada tabel V.4 peneliti memaparkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat yang menggunakan program tersebut. Petugas kebersihan 20 orang dengan persentase (70%) dan mahasiswa 10 orang dengan persentase (30%).

Tabel V.5 : Data Lokasi Banjir Yang Menjadi Objek Penelitian Dari Kecamatan Marpoyan damai.

No	LOKASI
1	Perumahan Griya Nusantara (Sidomulyo) Kel. Maharatu.
2	Jl. KH. Nasution sepanjang jalan Kartama Kelurahan Maharatu.
3	Simpang pasar pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur.
4	Perumahan Merak Kasha.
5	Jalan Garuda (Kel. Tangkerang Tengah).
6	Jalan Wonosari (Kel. Tangkerang Tengah).
7	Anak Sungai Sail II samping PT Bangkinang (Kelurahan Wonorejo).
8	Jalan Kuini (Jalan.T.Tambusai) (Kelurahan Wonorejo).
9	Jalan Arifin Ahmad (Kel. Tangkerang Barat).
10	Jalan KH. Nasution depan Indofood Kelurahan Maharatu.
11	Jalan Sudirman Gang Bancah di samping RS Tabrani (Kelurahan wonorejo).
12	Jalan Gulama.
13	Jalan Tongkol.
14	Jalan Paus.
15	Jalan T. Tambusai Gg. Ikhsan belakang Riau Mandiri.
16	Jalan Markisa (Kelurahan Wonorejo).
17	Jalan Pinang RW II (Kelurahan Wonorejo).
18	Jalan Soekarno Hatta (Depan Hotel Iblis).
19	Jalan Baung.
20	Jalan Sembilang.

Sumber : Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Pada tabel V.5 peneliti memaparkan lokasi-lokasi banjir yang menjadi objek penelitian di Kecamatan Marpoyan Damai ada sekitar 20 Jalan yang sering terkena banjir dan genangan.

1. Data Jumlah Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Di Kecamatan Marpoyan Damai 2018.

Berikut ini adalah informasi data jumlah program pembangunan drainase dan gorong-gorong yang berada di Kecamatan Pekanbaru Kota yang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel V.6 : Data Jumlah Pembuatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Di Kecamatan Marpoyan Damai.

No	Nama Jalan	Drainase	Gorong-gorong
1	Jl. Simpang Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur.	550 m	4 unit
2	Jl. Jalan Sudirman Gang Bencah di samping RS Tabrani (Kelurahan Wonorejo).	700 m	4 unit
3	Jl. Jalan Gulama	800 m	3 unit
4	Jl. Jalan Paus	-	5 unit
5	Jl. Jalan Sembilang	-	2 unit
6	Jl. Jalan Garuda (Kel. Tengkareng Tengah)	-	2 unit
7	Jl. Jalan Arifin Ahmad	750 m	2 unit
8	Jl. Soekarno Hatta (depan Hotel Ibis)	-	3 unit
9	Jalan Tongkol	-	3 unit
10	Jalan Baung	1000 m	6 unit
JUMLAH		3.800	32 unit

Sumber : Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2018.

2. Data Waktu Program Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2018.

Berikut ini adalah informasi mengenai waktu pelaksanaan normalisasi saluran sungai oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.7 : Data Waktu Program Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2018.

No	Nama Sungai	Waktu Pelaksanaan
1	Sungai Senapelan 1	23-26 September
2	Sungai Sail	8-15 Oktober
3	Sungai Tanggerang	5-8 November

Sumber : Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2018.

3. Data Waktu Pelaksanaan normalisasi saluran drainase dan jumlah rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase di Kecamatan Marpoyan Damai 2018.

Berikut ini adalah informasi mengenai informasi pelaksanaan normalisasi saluran drainase dan jumlah rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase di Kecamatan Marpoyan Damai 2018.

Tabel V.8 : Data Waktu Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase dan Jumlah Rehabilitasi atau pemeliharaan Saluran Drainase Di Kecamatan Marpoyan damai.

No	Nama Drainase	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Rehabilitasi Drainase	Waktu Pengerjaan
1	Drainase Terubuk	3 November	1000 m	30 hari
2	Drainase Markisa	4 November	900 m	25 hari
3	Drainase Duku	6 November	700 m	15 hari
4	Drainase Terubuk	8 November	1000 m	30 hari
5	Drainase Markisa	9 November	900 m	25 hari
6	Drainase Duku	10 November	700 m	15 hari
7	Drainase Tambusai	11 November	1.800 m	40 hari
8	Drainase Gulama	16 November	-	-
9	Drainase Merak	18 November	400 m	10 hari
10	Drainase Mandala	19 November	-	-
11	Drainase Kereta Api	22 November	-	-
12	Drainase Paus	-	1.200 m	30 hari
13	Drainase Garuda	24 November	750 m	15 hari
Jumlah			5.850 m	165 Hari

Sumber : Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2018.

A. Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (PUPR) Dalam Mengatasi Genangan Dan Banjir Di Kota Pekanbaru.

Evaluasi program adalah suatu entit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil eveluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan suprvisi. Kegiatan evaluasi atau supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari

evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program dan menyebarluaskan program.

Dalam evaluasi program, pelaksanaan (evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria tertentu. Dalam evaluasi, program pelaksanaan (evaluator) ingin mengetahui tingkat ketercapaian program dan apabila tujuan belum tercapai, maka pelaksanaan (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangannya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan.

Tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, man faat dan dampak dari program.

Pada prinsipnya peneliti menggunakan empat indikator dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (PUPR) Dalam Mengatasi Genangan Dan Banjir Di Kota Pekanbaru. Empat indikator tersebut adalah :

1. Pembuatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong

Untuk dapat melihat tanggapan reponden masyarakat selakuk pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir

husus untuk 1 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang dipilih peneliti sebagai objek penelitian yaitu Kecamatan Marpoyan damai terhadap indikator program drainase dan gorong-gorong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pembuatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong.

No	Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melaksanakan program pembangunan drainase dan gorong-gorong.	28 (93,3%)	2 (6,7%)	-	30 (100%)
2	Melakukan pembangunan drainase dan gorong-gorong dengan baik.	6 (20%)	22 (73,3%)	2 (6,7%)	30 (100%)
3	Melaksanakan pembangunan drainase dan gorong di wilayah yang sering banjir dan yang jarang terkena banjir.	4 (13,3%)	23 (76,7%)	3 (10%)	30 (100%)
4	Meningkatkan jumlah pembangunan drainase dan gorong-gorong.	13 (43,3%)	14 (46,7%)	3 (10%)	30 (100%)
Jumlah		51	61	8	120
Rata-rata		13	15	2	30
Persentase		43,3%	50%	6,7%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2018.

Berdasarkan tabel V.9 dapat dijelaskan bahwa klarifikasi tanggapan responden dari masyarakat selaku pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru pada indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong. Pada item penilaian yang pertama peneliti mempertanyakan masalah pelaksanaan pelaksanaan program pembangunan drainase dan gorong-gorong yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru, 28 orang menjawab terlaksana. Namun ada 2 orang responden yang memberikan jawaban cukup terlaksana hal

ini dikarenakan masih ada kekurangan dalam pembuatan pelaksanaan program pembangunan drainase dan gorong-gorong yang dilakukan oleh dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan SDA Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

“Selama ini pelaksanaan program-program pembangunan drainase dan gorong-gorong sebagian besar sudah terlaksana dan secara keseluruhan sudah selesai, namun khusus untuk satu wilayah kecamatan Marpoyan damai ada sebagian pembangunan gorong-gorong yang belum terlaksana contohnya seperti di jalan Garuda karena adanya factor keterbatasan alokasi anggaran itu sendiri. Dan untuk program pembangunan gorong-gorong yang belum terlaksana pada tahun 2016-2017 maka akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2018”.(sumber dari Bapak Rudy Wahyudi, ST Pada Tanggal 27 November 2018).

Pada item pertanyaan kedua dari indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong ini, peneliti menanyakan apakah Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah melakukan pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong dengan baik? 6 orang responden menjawab sudah terlaksana dengan baik, karena pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong sudah selesai dengan standar. Selanjutnya ada 22 responden menjawab cukup terlaksana dengan baik karena masih ada sebagian yang tidak sesuai seperti kurang besar dan kurang dalam. Namun ada 2 orang responden yang menjawab tidak terlaksana dengan baik karena drainase dan gorong-gorongnya tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Hal ini juga diperkuat dengan pertanyaan Bapak Kepala Bidang SDA PUPR Kota Pekanbaru melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Kepala Dinas. Berikut adalah pernyataan Bapak Kepala Bidang SDA tersebut :

“Sebelum kami membangun suatu saluran drainase terlebih dahulu kami turun kelapangan yaitu dengan mengumpulkan data lokasi-lokasi yang sering terjadi banjir, meneliti titik-titik genangan air, dan juga meneliti penyebab utama terjadinya suatu genangan dan banjir di wilayah tersebut serta jenis drainase yang seperti apa yang cocok untuk dibuat didaerah tersebut yang sesuai dengan standar. Lalu setelah itu kami membuat suatu drainase dan gorong-gorong yang bekerja sama dengan konsultan untuk membuat perencanaan agar pembangunan drainasenya tersebut terwujud dengan baik dan sesuai dengan standar yang ada. Di samping itu kami juga menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam pembuatan drainase ini seperti masih adanya pembangunan drainase yang tidak sesuai dnegan standar, da nada pembangunan gorong-gorong yang berhenti ditengah jalan atau belum terlaksana. Itu semua karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru itu sendiri ke Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu kami selaku pengguna anggaran Dinas PUPR terus mengajukan anggran yang semakin banyak kepada pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya untuk pembangunan drainase dan gorong-gorong agar pembangunannya dapat merata kesueluruh wilayah kota dan terwujud dengan baik serta sesuai dengan yang telah ditetapkan “(sumber dari Bapak Herdolatif, SE, MT Pada Tanggal 27 November 2018).

Pada item penilaian ketiga pada indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong ini, peneliti mempertanyakan masalah apakah Dinas PUPR Kota Pekanbaru melaksanakan pembengunan drainase dan gorong-gorong di wilayah yang sering tergenang dan banjir, 4 responden menjawab terlaksana, karena Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong desuai dengan wilayah yang sering tergenang dan banjir. Selanjutnya ada 23 responden yang menjawab cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian pembuatan program pembangunan drainase dan gorong yang tidak sesuai wilayahnya. Namun ada 3 orang responden yang menjawab tidak terlaksana dikarenakan Dinas PUPR Kota Pekanbaru melaksanakan program tersebut sama sekali tidak tepat atau tidak sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Item penilaian terakhir pada indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong ini, peneliti mempertanyakan masalah peningkatan jumlah pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong yang

dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Dari 30 responden, 13 responden menjawab terlaksana. Hal ini dikarenakan peningkatan pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong di wilayah Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada 14 responden memberi jawaban cukup terlaksana. Hal ini bermakna bahwa masih ada wilayah yang belum dibangun drainase dan gorong-gorong. Namun ada 3 responden menjawab tidak terlaksana dikarenakan di wilayahnya tidak ada peningkatan pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong. Bahkan ada di wilayah yang belum sama sekali dibangun drainase dan gorong oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai yang tertinggi berada dikategori cukup baik dengan persentase sebesar 50%. Dan apabila mengacu pada teknik pengukuran yang telah ditetapkan maka, tanggapan responden masyarakat pada indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong dalam program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru masuk dalam kategori "cukup terlaksana".

Adapun untuk wilayah Kota Pekanbaru khususnya untuk wilayah yang dibatasi peneliti dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Marpoyan Damai untuk pembuatan program pembangunan drainasenya dan gorong-gorongnya ada yang belum dilaksanakan yaitu tepatnya pada jalan Garuda.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong dikategorikan cukup terlaksana karena masih belum maksimal ada sebagian drainase dan gorong-gorong yang belum dilaksanakan atau di perbaiki yaitu di Jalan Garuda.

2. Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Sungai

Untuk dapat melihat tanggapan responden masyarakat selaku pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai yang dipilih peneliti sebagai objek penelitian terhadap indikator Program Rehabilitasi atau pemeliharaan saluran sungai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran sungai.

No	Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan Pergerakan sampah pada saluran sungai.	15 (50%)	12 (40%)	3 (10%)	30 (100%)
2	Melaksanakan Program rehabilitasi normalisasi saluran sungai.	10 (33,3%)	14 (46,7%)	6 (20%)	30 (100%)
3	Melaksanakan pembangunan drainase dan gorong di wilayah yang sering banjir.	11 (36,7%)	15 (50%)	4 (13,3%)	30 (100%)
4	Meningkatkan jumlah pembangunan drainase dan gorong-gorong.	11 (36,7%)	16 (53,3%)	3 (10%)	30 (100%)
Jumlah		47	57	16	120
Rata-rata		12	14	4	30
Persentase		40%	46,7%	13,3%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2018.

Berdasarkan tabel V.10 dapat dijelaskan bahwa klarifikasi tanggapan responden masyarakat untuk item penilaian pertama sebanyak 15 responden menjawab terlaksana, alasannya karena Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah pernah melakukan penggerukan sampah pada saluran sungai di wilayah masyarakat tersebut. Dan sebanyak 12 responden menjawab cukup terlaksana. Namun ada 3 orang responden yang memberikan jawaban tidak terlaksana. Hal

ini disebabkan karena di sekitar saluran sungai tidak pernah dilakukan penggerukan sampah oleh Dinas PUPR Kota pekanbaru dan mereka sendiri yang berinisiatif membersihkannya sendiri.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi SDA Dinas PUPR Kota Pekanbaru yakni:

“Dalam hal ini penggerukan sampah pada saluran sungai sebenarnya Dinas PUPR sudah bekerja secara maksimal. Khususnya untuk wilayah di Kecamatan Marpoyan Damai ada saluran sungainya yang belum dilaksanakan rehabilitasi atau pemeliharaan saluran sungai yaitu sungai senapelan 1. Dimana belum dilakukannya penggerukan sampah pada sungai tersebut. Karena dalam hal ini kami mempunyai keterbatasan sumber daya maka perlu adanya peran aktif masyarakat untuk membersihkan sampah pada saluran sungai disekitar wilayah mereka jika kami belm melakukannya.”(Bakri, ST Pada Tanggal 27 November 2018).

Pada item penilaian kedua 10 orang responden menjawab terlaksana dan 14 orang responden menjawab cukup terlaksana. Hal ini bermakna bahwa sudah melaksanakan program rehabilitasi atau normalisasi saluran sungai sudah cukup baik dan cukup terlaksana walaupun masih ada kekurangannya dan hal ini perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi.

Namun ada 6 orang yang memberikan jawaban tidak terlaksana dikarenakan di wilayah saluran sungai sekitar mereka belum pernah ada program pelaksanaan rehabilitasi saluran sungai yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Pada item penilaian ke tiga sebanyak 11 responden menyatakan terlaksana alasannya karena masyarakat menganggap bahwa Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah sering atau sudah meningkatkan intensitas penggerukan sampah pada saluran sungai yang berada disekitar responden.

Selanjutnya ada 15 responden yang memberikan jawaban cukup terlaksana dan 4 orang responden memberikan jawaban tidak terlaksana, dengan alasan bahwa saluran sungai yang berada disekitar mereka belum pernah dilakukan penggerukan sampah dan walaupun pernah yang melakukannya adalah masyarakat sekitarnya.

Pada item penilaian ke empat ini, peneliti mempertanyakan kepada responden mengenai penggerukan saluran sungai yang sudah mulai dangkal yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru. 11 orang responden memberikan jawaban terlaksana dan 16 orang responden memberikan jawaban cukup terlaksana hal ini dikarenakan Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah pernah melakukan penggerukan saluran sungai yang sudah mulai dangkal yang bersamaan dengan penggerukan sampah pada saluran sungai. Namun ada 3 orang yang memberikan jawaban tidak terlaksana dikarenakan Dinas PUPR Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan penggerukan saluran sungai yang sudah mulai dangkal di sekitar mereka.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi berada dikategori dengan persentase sebesar 46,7%. Bila mengacu pada teknik pengukuran, maka tanggapan responden masyarakat pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru pada indikator Program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran drainase masuk dalam kategori "cukup terlaksana". Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Kategori cukup terlaksana ini bermakna bahwa pada indikator ini masih banyak terdapat kekurangan dan perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan

oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru karena masih ada saluran sungai yang peneliti temukan dilapangan belum dilakukan penggerukan sampah yaitu saluran sungai senapelan 1 di Kecamatan Marpoyan Damai. Selain itu peran masyarakat sangat diperlukan dalam pemeliharaan normalisasi saluran sungai yang ada di sekitar saluran sungai Senapelan 1.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dikatakan indikator program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru dikategorikan cukup terlaksana atau belum terlaksana secara merata karena masih ada saluran sungai yang belum dilakukan penggerukan sampah yaitu saluran sungai Senapelan 1 yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai.

3. Program Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase

Untuk dapat dilihat tanggapan responden masyarakat selaku pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai terhadap indikator saluran drainase dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Program Normalisasi saluran Drainase.

No	Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melaksanakan Program Normalisasi Saluran Drainase dengan baik.	12 (40%)	16 (53,3%)	2 (6,7%)	30 (100%)
2	Melakukan Penggerukan sampah pada saluran drainase.	16 (53,3%)	12 (40%)	2 (10%)	30 (100%)
3	Melaksanakan Program sesuai dengan kondisi di wilayah banjir.	7 (23,3%)	18 (60%)	5 (16,7%)	30 (100%)
4	Melakukan penggerukan saluran drainase yang sudah mulai dangkal.	12 (40%)	14 (46,7%)	4 (13,3%)	30 (100%)
Jumlah		47	60	13	120
Rata-rata		12	15	3	30
Persentase		(40%)	(50%)	(10%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2018.

Berdasarkan tabel V.11 dapat dijelaskan bahwa klarifikasi tanggapan responden masyarakat untuk item penilaian pertama ada 12 orang responden memberikan jawaban terlaksana alasannya karena Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah bekerja dengan baik dalam membersihkan sampah dan tanah yang menutupi saluran drainase dan 16 orang responden menjawab cukup terlaksana. Hal ini bermakna bahwa Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah melaksanakan program normalisasi saluran drainase sudah baik walaupun masih ada perlu peningkatan intensitas normalisasi saluran drainase terutama pada wilayah yang sering terjadi genangan dan banjir. Namun ada 12 orang responden yang menyatakan tidak terlaksana, karena Dinas PUPR Kota Pekanbaru belum pernah melakukan program normalisasi saluran drainase di sekitar wilayah mereka tinggal padahal saluran drainasenya sudah penuh dengan sampah sehingga banjir pun sering terjadi.

Pada item penelitian kedua peneliti mempertanyakan apakah Dinas PUPR Kota pekanbaru sudah pernah melakukan penggerukan sampah pada saluran drainase. 16 orang responden memberikan jawaban terlaksana, hal ini dikarenakan Dinas PUPR sudah sering atau pernah melakukan penggerukan sampah pada saluran sungai disekitar mereka dengan mengarahkan petugas kebersihan atau yang dikenal dengan pasukan kuning mereka juga menyadari bahwa masalah sampah tersebut tidak hanya masalah Dinas PUPR saja dan perlu adanya kembali di aktifkan budaya gotong-royong yang selama ini sudah mulai ilang. Selanjutnya ada 12 orang responden memberikan jawaban cukup terlaksana mengenai penggerukan sampah pada saluran drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Tetapi ada 2 responden memberikan jawaban tidak terlaksana karena disekitar saluran drainase mereka tidak pernah dilakukan penggerukan sampah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris SDA di Kantor Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

“Kami sudah berupaya secara maksimal untuk membersihkan sampah pada saluran drainase dengan meningkatkan intensitasnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya penerjunan pasukan kuning lapangan apabila ada saluran drainase yang sudah dipenuhi dengan sampah. Tetapi karena adanya keterbatasan sumber daya yang ada maka ada sebagian saluran drainase di Kecamatan Marpoyan Damai. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan peran masyarakat untuk kembali menggerakkan budaya gotong-royong dan membudayakan perilaku yang membuang ampah sembarangan ke saluran drainase.”(sumber dari Bapak Alfa, ST Pada Tanggal 27 November 2018).

Pada item penilaian ketiga 7 orang responden memberikan jawaban terlaksana karena adanya normalisasi saluran drainase di wilayah sering banjir yang dilakukan oleh Dinas PUPR sudah tepat sasaran dan banjir yang pada awalnya sering terjadi di wilayah tersebut maka sekarang sudah tidak pernah

terjadi lagi. Dan 18 orang responden memberikan jawaban cukup terlaksana, hal ini dikarenakan masalah banjir tidak hanya dengan melakukan normalisasi drainase pada wilayah yang sering banjir tetapi Dinas PUPR juga cari alternative lain selain melakukan normalisasi saluran drainase di wilayah sering terjadi genangan dan banjir. Tetapi disamping itu ada 5 orang responden memberikan jawaban tidak terlaksana karena ada sebagian wilayah yang sering terjadi banjir tidak dilakukan normalisasi saluran drainase tetapi sebaliknya wilayah yang tidak pernah banjir malah sering dilakukan normalisasi saluran drainasenya.

Pada item penilaian yang terakhir di indikator pelaksanaan normalisasi saluran drainase, 12 orang responden memberikan jawaban terlaksana karena Dinas PUPR sudah meningkatkan intensitas penggerukan sampah pada saluran drainase terutama pada saluran drainase yang sering terjadi penumpukan sampah. Dan ada 14 orang responden memebrikan jawaban cukup terlaksana karena Dinas PUPR sudah meningkatkan intensitas penggerukan sampah kestika sudah mulai musim penghujan tiba. Namun ada 4 orang memberikan jawaban tidak terlaksana dikarenakan Dinas PUPR hanya membersihkan saluran drainase apabila ada laporan dari masyarakat.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai yang tertinggi berada pada persentase 50%. Dan apabila mengacu pada teknik pengukuran, maka tanggapan responden masyarakat pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru pada indikator pelaksanaan normalisasi saluran drainase khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai dari 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian , ini masuk dalam kategori “cukup terlaksana”.

Kategori cukup terlaksana ini bermakna bahwa pada indikator pelaksanaan normalisasi saluran drainase tersebut perlu adanya perbaikan lagi karena masih ada saluran drainase yang belum dilakukan normalisasi seperti yang ditemui peneliti dilapangan yaitu saluran drainase yang terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai di Jalan Garuda (Kel.Tengkareng Tengah. Selain itu Dinas PUPR Kota Pekanbaru seharusnya tidak hanya melakukan normalisasi ketika sampah sudah banyak menyumbat pada saluran drainase dan tidak hanya ditingkatkan intensitasnya pada musim hujan saja tetapi di lakukan penggerukan sampah sebelum musim hujan tiba dan harus di tingkatkan intensitasnya.

Dari keterangan-keterangan diatas dengan demikian analisa peneliti untuk indikator pelaksanaan normalisasi saluran drainase khususnya untuk wilayah yang menjadi objek penelitian yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dikategorikan cukup terlaksana meskipun belum maksimal dilaksanakannya normalisasi saluran drainase tepatnya saluran drainase yang berada pada Jalan Garuda (Kel.Tangkerang Tengah).

4. Rehabiltasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase

Untuk dapat melihat tanggapan masyarakat selaku pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai terhadap indikator rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase.

No	Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Memperbaiki kembali saluran drainase yang sudah rusak.	14 (46,7%)	10 (33,3%)	6 (20%)	30 (100%)
2	Mengecek secara rutin kondisi saluran drainase yang ada.	15 (50%)	9 (30%)	6 (20%)	30 (100%)
3	Dinas PUPR Kota Pekanbaru bekerja dengan baik dan maksimal dalam mengatasi genangan dan banjir.	10 (33,3%)	17 (56,7%)	3 (10%)	30 (100%)
4	Memebersihkan area sekitar saluran drainase yang dapat menghambat air.	9 (30%)	16 (53,3%)	5 (16,7%)	30 (100%)
	Jumlah	48	52	20	120
	Rata-rata	12	13	5	30
	Persentase	(40%)	(43,3%)	(16,7%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2018.

Berdasarkan tabel V.12 dapat dijelaskan bahwa klarifikasi tanggapan responden terhadap indikator rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase pada item penilaian pertama ada 14 orang responden memberikan jawaban terlaksana alasannya karena Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah penuh melakukan perbaikan-perbaikan pada saluran drainase yang sudah rusak dan membangun kembali saluran drainase yang pada awalnya kecil menjadi besar. Selanjutnya ada 10 orang responden menjawab cukup terlaksana. Tetapi ada 6 orang responden yang menjawab tidak terlaksana hal ini karena saluran drainase disekitar mereka sudah ada yang rusak tetapi Dinas PUPR Kota Pekanbaru tidak juga membangun atau memperbaiki kembali saluran drainasenya.

Hal ini di perkuat dengan Pernyataan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut pernyataannya :

“Untuk saluran drainase yang sudah mulai rusak atau tidak mampu lagi menampung debit air karena drainase terlalu kecil, kami sudah mempertanyakannya dan merevitalisasi kembali. Karena dalam hal ini kami juga sudah ada timnya sendiri yaitu yang dinamakan tim pemeliharaan saluran drainase, kami juga menyadari walaupun masih ada di Kecamatan Marpoyan Damai tersebut yang program pemeliharaan saluran drainasenya yang masih ditutupi oleh rumput atau semak seperti saluran drainase yang berada disekitar jalan Arifin sembilang Kecamatan Marpoyan Damai. Karena wilayah Kota Pekanbaru yang cukup luas dan saluran drainase yang begitu banyak sekali maka kami memantaunya secara sendiri karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Oleh karena itu kami perlu adanya bantuan masyarakat untuk melaporkan kepada kami jika ada saluran drainase yang sudah rusak dan masih ditutupi oleh rumput atau semak”(sumber dari Bapak Hendrolatif, SE, MT Pada Tanggal 27 November 2018).

Pada item penilaian kedua 15 orang responden memberikan jawaban terlaksana, karena mereka sering melihat tim Dinas PUPR sudah sering mengecek saluran drainase. Dan ada 9 responden memberikan jawaban cukup terlaksana Karena ada sebagian responden mengatakan tidak mengetahuinya bahwa yang mengecek tersebut adalah tim Dinas PUPR. Namun ada 6 orang responden yang mengatakan jawaban tidak terlaksana Karena saluran drainase di sekitar wilayah mereka tidak pernah ada tim dari Dinas PUPR yang melakukan pengecekan saluran drainase.

Pada item penilaian ketiga ada 10 orang responden masyarakat terlaksana, karena Dinas PUPR sudah bekerja dengan baik dan maksimal dalam mencegah genangan dan banjir. Dan 17 orang responden memberikan jawaban cukup terlaksana karena responden mengatakan bahwa Dinas PUPR tidak mungkin bekerja sendiri dalam mencegah genangan dan banjir tetapi harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga perlunya peran kami sebagai

masyarakat dalam menjaga saluran drainase bersama-sama. Tetapi ada 3 responden memberikan jawaban tidak terlaksana dengan baik karena Dinas PUPR hanya bekerja bila musim hujan mulai tiba. Kalau tidak musim hujan maka mereka tidak pernah turun kelapangan untuk mencegah genangan dan banjir.

Dan pada item penilaian terakhir pada indikator Rehabilitasi atau Pemeliharaan saluran Drainase 9 orang responden menjawab terkasana. Karena Dinas PUPR Kota Pekanbaru membersihkan area sekitar saluran drainase bersamaan dengan pembersihan sampah pada saluran drainase. Dan ada 16 orang responden memberikan jawaban cukup baik karena Dinas PUPR kadang melakukan pembersihan area sekitar saluran drainase dan kadang tidak dibersihkan. Namun ada 5 orang responden yang memberikan jawaban tidak terlaksana karena sebagian besar saluran drainase yang ada disekitar mereka sudah tertutup oleh rumput atau semak dan tidak pernah dibersihkan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai yang tertinggi berada pada persentase 43,3%. Dan apabila mengacu pada teknik pengukuran, maka tanggapan responden masyarakat pengguna program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru untuk wilayah di Kecamatan Marpoyan Damai dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru ini yang menjadi objek penelitian. Kecamatan Marpoyan Damai pada indikator rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase masih ada kekurangan karena masih belum terwujudnya secara keseluruhan program rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran drainase khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai yang menjadi objek penelitian dari peneliti.

Oleh sebab itu menurut analisa peneliti pada indikator rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase khusus untuk wilayah yang menjadi objek penelitian yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dikategorikan cukup terlaksana atau belum maksimal dilaksanakan khususnya di sekitaran saluran drainase Jalan Garuda (Tangkerang Tengah) Kecamatan Marpoyan Damai belum dicapai hasilnya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat setempat.

Oleh sebab itu perlu adanya penambahan jumlah personil khususnya tim pemeliharaan saluran drainase yang ada di lapangan. Dan masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada Dinas PUPR Kota Pekanbaru saja dalam memelihara saluran drainase ini. Mereka harus turut serta dalam pemeliharaan saluran drainase demi kepentingan bersama.

Jika dilihat dari program-program mengatasi genangan dan banjir oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru maka perlu adanya perbaikan-perbaikan program yang telah dijalankan dan ini menjadi harus diperhatikan khusus pemerintah Kota Pekanbaru karena masih banyaknya program-program yang belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia itu sendiri, dan untuk masyarakat Kota Pekanbaru harus kembali menggalakkan budaya gotong-royong yang sudah mulai hilang di Kota Pekanbaru terutama dalam membersihkan saluran-saluran drainase dari sampah disekitar mereka. Sampah yang menyumbat pada saluran drainase itu merupakan perilaku masyarakat itu sendiri yang selalu membuang sampah sembarangan terutama pada saluran drainase. Untuk genangan dan banjir ini bukan hanya tugas dari Dinas PUPR saja tetapi perlu adanya peran aktif masyarakat untuk turut serta bersama-sama menjaga dan mencegah genangan

dan banjir tersebut terulang kembali demi terciptanya Kota Pekanbaru yang terbatas dari genangan dan banjir di masa yang akan datang.

B. Hasil Rekapitulasi Dari Tanggapan Responden Dalam penelitian Tentang Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru.

Fungsi utama evaluasi adalah memberikan data dan informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu program. Sehingga, pembinaan program tersebut dapat diambil suatu keputusan yang tepat, apakah program tersebut akan diteruskan, ditunda atau digagalkan sama sekali. Tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dari semua hasil penjelasan tersebut menurut responden dari masing-masing indikator diatas, maka dapat kita lihat rekapitulasi keseluruhan jawaban dari masyarakat selaku pengguna program dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru.

Tabel V.13 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dalam Evaluasi Dinas PUPR Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Genangan dan Banjir Di Kota pekanbaru.

No	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pembuatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong	13 (43,3%)	15 (50%)	2 (6,7%)	30 (100%)
2	Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	12 (40%)	14 (46,7%)	4 (13,3%)	30 (100%)
3	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Drainase	12 (40%)	15 (50%)	3 (10%)	30 (100%)
4	Rehabilitasi atau Pemeliharaan Saluran Drainase	12 (40%)	13 (43,3%)	5 (16,7%)	30 (100%)
	Jumlah	49	57	14	120
	Rata-rata	12	14	4	30
	Persentase	(40%)	(46,7%)	(13,3%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2018

Dari tabel akumulasi jawaban responden masyarakat yang merupakan pengguna program Evaluasi dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genanga dan banjir di Kota Pekanbaru dilihat dari indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong, konsep program rehabilitasi mendisain/ menilai pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pelaksanaan normalisasi saluran drainase dan rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase maka jawaban responden memperoleh hasil yang tertinggi berada pada kategori “Cukup Terlaksana dengan persentase 46,7, dan hal ini sesuai dengan kriteria pengukuran yang telah ditetapkan yaitu apabila rata-rata penilaian atau jawaban responden berada pada rata-rata 34-66% masuk dalam kategori “Cukup Terlaksana”. Dengan demikian hasil dari rekapitulasi ini masuk pada kriteria “Cukup Terlaksana”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan tentang Evaluasi dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian responden masyarakat selaku pengguna dari program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatsai genangan dan banjir di Kota Pekanbaru untuk indikator pembuatan program pembangunan drainase dan gorong-gorong dikategorikan cukup terlaksana atau belum maksimal dilaksanakan.

Untuk indikator Program Rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai dikategorikan cukup terlaksana atau masih terdapat kekurangan. Dalam hal ini menurut peneliti Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program Rehabilitasi atau pemeliharaan normalisasi saluran sungai haruslah terlaksana dengan baik dalam mencegah banjir agar tidak terulang kembali. Karena menurut peneliti selama ini walaupun program tersebut sudah dilaksanakan tetapi banjir masih saja terjadi di Kota Pekanbaru sehingga anggaran yang digunakan tidak sia-sia begitu saja. Hal ini dapat dilihat pada saluran sungai Senapelan 1 dimana walaupun sering dilakukan penggerukan sampah tetapi banjir masih saja terulang di sekitar Jalan Sembilang.

Pada indikator Pelaksanaan normalisasi saluran drainase menurut peneliti dikategorikan cukup terlaksana karena disini juga masih ada beberapa kekurangan yang seharusnya terlaksana dengan baik dalam hal ini. Untuk pelaksanaan normalisasi saluran drainase khususnya untuk Kecamatan Marpoyan damai tidak semuanya terlaksana dengan apa yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada oleh Dinas PUPR karena masih ada saluran drainase di Kecamatan Marpoyan Damai yang belum dilaksanakan normalisasi saluran drainase yang berada di Jalan Sembilang.

Sedangkan pada indikator terakhir yaitu Rehabilitasi atau pemeliharaan saluran drainase yang menurut peneliti dikategorikan cukup terlaksana atau masih ada yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena pencapaian hasil untuk memecahkan masalah genangan dan banjir di Kota Pekanbaru khususnya di sekitaran saluran drainase Jalan Garuda (Tangkerang Tengah) Kecamatan Marpoyan Damai belum dicapai hasilnya sesuai dengan yang di inginkan masyarakat setempat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru berada pada kategori **“cukup terlaksana”**.
2. Dari hasil tanggapan responden masyarakat terhadap penelitian tentang program-program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru berada pada kategori “cukup terlaksana”.
3. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, program Dinas PUPR dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru belum terlaksana sepenuhnya dengan baik.
4. Faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi genangan dan banjir di Kota Pekanbaru yaitu :
 - a. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia / pegawai Dinas PUPR.
 - b. Kemampuan teknologi yang masih rendah untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi.
 - c. Fasilitas yang kurang memadai dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

- d. Tidak adanya sumur resapan di setiap rumah atau penghijauan di Kota Pekanbaru sehingga daya serap air masih kurang.
- e. Cara hidup masyarakat yang tidak sehat, karena masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan.
- f. Kurangnya pengaturan dari Dinas PUPR, sehingga bentuk tata ruang masih semerawut (tidak beraturan).
- g. Kurangnya kombinasi koordinasi antara Dinas PUPR dengan camat dan lurah setempat di Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian yaitu:

1. Dinas PUPR Kota Pekanbaru harus meningkatkan kerjanya secara maksimal dalam mewujudkan program-program Dinas PUPR dan lebih tanggap dalam memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat.
2. Dinas PUPR Kota Pekanbaru harus menyediakan forum komunikasi langsung atau kontak pengaduan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan keluhan-keluhan yang terjadi dilapangan.
3. Dinas PUPR Kota Pekanbaru harus mengevaluasi kembali program-program yang belum tepat sasaran dan tidak terwujud dengan baik, memprioritaskan program-program yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya, supaya program-program yang belum dilaksanakan atau pun masih setengah jalan dapat terlaksana dengan baik.
4. Dinas PUPR Kota Pekanbaru harus menambah personil atau sumber daya manusia khususnya yang bekerja dilapangan. Disamping itu,

Dinas PUPR Kota Pekanbaru harus menambah anggaran untuk tahun berikutnya agar program yang ada dapat terlaksana dengan baik.

5. Masyarakat Kota Pekanbaru harus disiplin membuang sampah pada tempatnya, menghidupkan kembali budaya gotong-royong yang pada saat ini sudah mulai pudar, dan turut aktif dalam menjaga saluran drainase dan saluran sungai yang tidak hanya bergantung kepada Dinas PUPR saja. Karena bagaimanapun juga dengan adanya peran serta masyarakat dalam mengatasi genangan dan banjir khususnya dalam menjaga saluran drainase dan gorong-gorong, maka masalah genangan dan banjir di Kota Pekanbaru akan dapat teratasi dan program-program Dinas PUPR Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan Purwanto et al, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gava Media.
- Arikunto, Suharsimi, 2004. *Manajemen Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Brantas, 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Buku pedoman penulisan *Penelitian Edisi Revisi*. 2013. Pekanbaru, UIR Press.
- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Handoko, Hani, 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta. BPFY Yogyakarta.
- Red, David, 2006. *Manajemen Strategis Konsep Edisi :10*. Jakarta, Salemba Empat.
- Handoko, Hani, 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta, BPFY Yogyakarta.
- Hubeis, Musa et al, 2008. *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, Amin, 2004. *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Bandung, Bandar Maju.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*, Yogyakarta, Gava Media.
- Jones, Carles, 1995. *Pengantar Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, CST et al, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Koryati, Nyiman Dwi, 2005. *Kebijakan Manajemen dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Jakarta, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Kusdi, 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Nannulang, 2009. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nugroho, Rian, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, Alex Media Komputindo.
- Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.

- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rasul, Syahrudin, 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, CV Mandar Maju.
- Siagian, Sondang. P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. P, 2006. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Bumi aksara.
- Sugiono, Prof. Dr, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, cv.
- Syafriie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga. Yogyakarta, Lukman Ofset.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Terry, R. George. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Tred, David, 2006. *Manajemen Strategis Konsep Edisi 10*. Jakarta, Salemba Empat.
- Tripomo, Udan et. al, 2005. *Manajemen Strategi*. Bandung, Rekayasa Sains.
- Wirawan, 2011. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Presi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR PRESS.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR PRESS.

Dokumentasi :

Perda Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

BPS Kota Pekanbaru.

Dokumen-dokumen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (PUPR) Kota Pekanbaru.

